



Kementerian Pertanian  
Republik Indonesia

# SOLUSI SYL MEMENUHI KEBUTUHAN PEMBIAYAAN PERTANIAN MELALUI OPTIMALISASI KUR





# **SOLUSI SYL MEMENUHI PEMBIAYAAN PERTANIAN MELALUI OPTIMALISASI KUR**

**SUDI MARDIANTO, DKK**

**KEMENTERIAN PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 2022**

# SOLUSI SYL MEMENUHI KEBUTUHAN PEMBIAYAAN PERTANIAN MELALUI OPTIMALISASI KUR

## **PENASIHAT**

Dr. Ir. Kasdi Subagyo, M.Sc (Sekretaris Jenderal  
Kementerian Pertanian)

## **PENANGGUNG JAWAB**

Dr. Ir. I Ketut Kariyasa, M.Si (Kepala Biro Perencanaan  
Kementerian Pertanian)

## **TIM PENYELARAS**

Dr. Ir. Sudi Mardianto, M.Si  
Prof (Riset) Dr. Ir. Achmad Suryana, MS  
Prof. Dr. Ir. Hermanto Siregar, M.Ec

## **TIM PENULIS**

Dr. Ir. Sudi Mardianto, M.Si  
Dr. Ir. I Ketut Kariyasa, M.Si  
Prof (Riset) Dr. Ir. Achmad Suryana, MS  
Dr. Ir. Abdul Basit, MS  
Dr. Akhmad Musyafak, S.P., M.P.  
Prof (Riset) Dr. Ir. Sahat Marulitua Pasaribu, M.Eng  
Prof. (Riset) Dr. Ir. Erizal Jamal, M.Si.  
Dr. Endro Gunawan, S.P., M.E.  
Ir. Indah Megahwati, M.P.  
Dr. Saefudin, S.P., M.Si.  
Mirza Sativa, S.P., M.Si  
Tatu Wulandari, S.E., M.Si  
Naufal Nur Mahdi, S.E., M.Si

## **TIM PENDUKUNG**

Siswoyo, S.P., M.P  
Akbar Choer, S.Pt  
Taufik Fathurrahman, S.TP., M.Sc  
Nur Rokhmah Fitriani, S.P.  
Santosa Raharjo, S.P., M.Si  
Syndia Rahmadani, S.E.

## **FOTO**

Biro Humas dan Informasi Publik Kementerian Pertanian

## **DESAIN COVER & LAYOUT**

Andy Mashudi, A.Md

## **Penerbit:**

Kementerian Pertanian  
Jl. Ir. H. Juanda No. 20, Kota Bogor 16122, Indonesia  
Telp (0251) 8321746, Fax (0251) 8326561

**Cetakan Pertama** : Desember 2022

**ISBN** : 978-979-582-220-2



## PENGANTAR MENTERI PERTANIAN

Pandemi Covid-19 telah berdampak pada berbagai sektor usaha, termasuk sektor pertanian dalam 3 tahun terakhir ini. Meskipun saat ini kondisi pandemi telah membaik dari sebelumnya, perlu diingat bahwa pandemi belum sepenuhnya berakhir. Selain itu, langkah dan tantangan pemulihan ekonomi nasional masih dibayang-bayangi oleh situasi *extraordinary* yang sulit diprediksi. Sebagai Menteri Pertanian pada Kabinet Indonesia Maju dalam Pemerintahan Presiden Joko Widodo, Kementan tidak pernah surut dan terus berupaya mengoptimalkan peran sektor pertanian sebagai tulang punggung dan bantalan ekonomi nasional dan akselerasi pemulihan ekonomi nasional.

Ancaman krisis pangan global yang terjadi saat ini dan masih berlangsungnya Pandemi Covid-19, Kementan merasa tidak hanya “vaksin” kesehatan yang diperlukan oleh para petani, tetapi juga dibutuhkan “vaksin” permodalan pertanian untuk membantu petani dalam bertahan dan bangkit mengembangkan usaha taninya. “vaksin” permodalan pertanian ini bertujuan agar petani memiliki imunitas dan terbangun semangat dan motivasinya serta kepercayaan dirinya ditengah keterbatasan. Vaksin permodalan pertanian itu bernama Kredit Usaha Rakyat (KUR) pertanian. Vaksin ini diharapkan dapat mendorong berjalannya usahatani dan pembangunan pertanian lebih baik untuk menaikkan “naik kelas petani” dalam mewujudkan pertanian maju, mandiri dan modern.

Hadirnya KUR Pertanian ini ibarat oase di tengah semakin terbatasnya anggaran

pemerintah untuk membantu petani kita (pejuang-pahlawan pangan). Kementan menyadari keterbatasan anggaran pemerintah, tidak akan mampu sepenuhnya membiayai keseluruhan kebutuhan sektor pertanian. Mengatasi hal tersebut, Kementan bergegas mengambil langkah *extraordinary yang business not as usual* melalui penerapan konsep *piramida terbalik* penganggaran pertanian dengan mendorong KUR Pertanian dari perbankan untuk diakses dan dimaksimalkan kemanfaatannya oleh para petani sebagai salah satu jalan keluar permodalan.

Keberhasilan dibuktikan Menteri Pertanian dan tercermin dari besarnya realisasi KUR selama 3 tahun terakhir yang selalu melampaui target yang ditetapkan. Tahun 2021 serapan realisasi KUR Pertanian mencapai Rp 85,62 Triliun atau 122,31 persen dari target Rp 70 Triliun, sementara tahun 2020 realisasi penyaluran KUR sektor pertanian mencapai Rp 50 Triliun. Salah satunya berkat kinerja KUR inilah, sektor pertanian mampu terjaga positif selama masa pandemi. Capaian tersebut akan terus Kementan dorong melalui berbagai pendekatan dan inovasi-inovasi dalam kebijakan KUR pertanian untuk memperluas lagi petani yang memperoleh akses permodalan. Akses tersebut, dengan cara mempermudah syarat tanpa agunan tambahan, memberikan fasilitas KUR khusus untuk kelompok komoditas pertanian dan komoditas produktif lainnya dengan menggandeng perusahaan mitra sebagai bapak angkat (*offtaker*) serta memberikan relaksasi ketentuan KUR bagi petani mulai penundaan pembayaran pokok, perpanjangan waktu dan penambahan limit KUR.

Kementan sengaja mempersembahkan buku KUR pertanian ini kepada seluruh pihak-





*stakeholder*, untuk mengetahui cara berfikir dan bertindak Menteri Pertanian ditengah kesulitan dan keterbatasan anggaran dalam pembangunan pertanian. Selalu ada jalan dan terdapat secercah harapan melalui cara kerja keras dan ikhlas. Pemikiran pembiayaan KUR pertanian sebagai jalan keluar mengatasi keterbatasan anggaran pertanian tentu tidak akan berhasil tanpa sinergi, kolaborasi dan gotong royong seluruh pihak khususnya dengan para petani. Kementan ingin menyampaikan pesan kepada semua khalayak, khususnya para petani, bahwa pembiayaan KUR pertanian bukanlah hal yang menyulitkan dan menakutkan, namun merupakan harapan baru untuk jalan menuju kemajuan pertanian dan mendorong petani agar bisa “*naik kelas*” untuk mewujudkan pertanian maju, mandiri dan modern.

Terima kasih kepada pihak-pihak yang memiliki andil dalam penulisan buku ini, baik dalam bentuk ide, pikiran dan tenaga demi terselesaikannya buku ini hingga dapat diterbitkan. Semoga kehadiran buku ini mampu memberi sekaligus membuka pemikiran dan inspirasi dalam ikut andil memperkuat peran KUR pertanian yang berpihak pada petani dan pelaku usaha sektor pertanian yang bermuara pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani secara berkelanjutan.

Jakarta, 16 Desember 2022

Syahrul Yasin Limpo  
Menteri Pertanian RI

# DAFTAR ISI

i	<b>PENGANTAR MENTERI PERTANIAN</b>
iv	<b>DAFTAR ISI</b>
i	<b>I. PENDAHULUAN</b>
7	<b>II. MEWUJUDKAN PETANI NAIK KELAS DAN MANDIRI SECARA BERKELANJUTAN</b>
7	Pertanian Maju, Mandiri, Modern
10	Petani (Harus) “Naik Kelas”
13	Petani (Harus) Mandiri
16	<b>III. KUR SEBAGAI SALAH SATU ENERGI PEMBANGUNAN PERTANIAN</b>
16	KUR sebagai Mesin Penggerak Perekonomian Nasional
22	Skim KUR sebagai Sumber Pembiayaan yang Berpihak ke Petani
35	<b>IV KUR BERGERAK, PETANI TERGERAK</b>
35	Capaian Penyaluran KUR Sektor Pertanian
43	Kontribusi KUR terhadap Kinerja Sektor Pertanian
48	KUR Mendongkrak Kinerja Usaha Pertanian
50	Tantangan Implementasi KUR Sektor Pertanian
56	<b>V. PEMBELAJARAN MANAJEMEN SYL DALAM PEMBIAYAAN PERTANIAN</b>
57	Keberhasilan Manajemen SYL
59	Optimalisasi Manajemen SYL
60	Menjaga Keberlanjutan KUR Pertanian
66	<b>VI. PENUTUP</b>
69	<b>VII. PROFIL MENTERI PERTANIAN SYAHRUL YASIN LIMPO</b>

## DAFTAR TABEL

1	Kebijakan KUR masa pandemi Covid-19	19
2	Fitur KUR Menurut Jenisnya Tahun 2022	20

## DAFTAR GAMBAR

1.	Target, Realisasi dan Jumlah Debitur Penyaluran KUR Pertanian, 2020-2022	5
2.	Jumlah Rumah Tangga Petani Gurem Tahun 2013 dan 2018	11
3.	Tingkat pendidikan petani Tahun 2018	11
4.	Jumlah Petani Menurut Kelompok Usia Tahun 2018	11
5.	Persentase penggunaan mekanisasi dan teknologi oleh petani	12
6.	Evolusi Kredit Usaha Rakyat (KUR)	18
7.	Perkembangan Realisasi Penyaluran KUR Sektor Pertanian Berdasarkan Jenis KUR Tahun 2020-2022 (Dalam Triliun Rupiah)	20
8.	Target Penyaluran KUR 2020 - 2024 (Rp Triliun)	21
9.	Halaman Depan Permentan No. 03 Tahun 2021	23
10.	Bisnis Model KUR Pertanian	30
11.	Zonasi Taksi Alsintan Merah Putih	38
12.	Proses Bisnis Taksi Alsintan Melalui Pola Transformasi UPJA	40
13.	Proses Bisnis Taksi Alsintan Melalui Pola Individu(petani)/ Poktan/Gapoktan/Swasta	40
14.	Realisasi dan Tingkat NPL KUR Pertanian, 2020-2022* (Rp Triliun)	42
15.	Jumlah Debitur KUR Pertanian Berdasarkan Sub Sektor Tahun 2020-2022 (Ribu Petani)	43
16.	Realisasi KUR Pertanian Subsektor Tanaman Pangan Tahun 2020-2022 (Rp Triliun)	46
17.	Realisasi KUR Pertanian Subsektor Hortikultura Tahun 2020-2022 (Rp Triliun)	47
18.	Realisasi KUR Pertanian Subsektor Perkebunan Tahun 2020-2022 (Rp Triliun)	47
19.	Realisasi KUR Pertanian Subsektor Peternakan Tahun 2020-2022 (Rp Triliun)	48
20.	Dampak KUR terhadap peningkatan produktivitas dan skala usaha pertanian	49



## I. PENDAHULUAN

Salah satu aspek penting dalam melaksanakan dan/atau mengembangkan usaha, termasuk usaha pertanian, adalah permodalan. Ketersediaan modal yang memadai merupakan prakondisi penting agar usaha dapat dilaksanakan secara optimal, sehingga akan tercapai hasil yang maksimal. Dalam usaha budi daya pertanian, keterbatasan modal dapat berpengaruh pada kemampuan petani mengakses dan menerapkan teknologi usaha tani rekomendasi, sehingga menjadi kendala dalam upaya peningkatan produktivitas dan pendapatan petani, khususnya bagi petani kecil. Petani seringkali menghadapi keterbatasan untuk mengakses lembaga perkreditan karena persyaratan agunan (*collateral*). Konsekuensinya, petani menjadi pihak yang kurang mendapat keuntungan dari perkembangan teknologi maupun inovasi di bidang pertanian yang umumnya memerlukan tambahan input produksi.

Bagi petani, modal bahkan dipandang tidak hanya sekedar sebagai input produksi. Lebih jauh, modal merupakan suatu instrumen yang memungkinkan seseorang untuk memperoleh akses atau memperluas kontrol terhadap sumber daya lainnya. Oleh karena itu, modal juga merupakan faktor yang sangat penting dalam pembangunan pertanian, khususnya dalam rangka memberdayakan petani kecil. Hal ini sangat dipahami oleh Syahrul Yasin Limpo (SYL), sehingga pada awal tugasnya sebagai Menteri, salah satu aspek yang sering disampaikan dan didiskusikan adalah terkait dukungan permodalan petani. Pengalaman panjang sebagai Kepala Daerah (Kepala Desa, Camat, Bupati dan Gubernur), menjadikan SYL sangat paham terhadap kondisi dan berbagai kesulitan yang dihadapi petani dalam menjalankan usaha taninya. Salah satu kesulitan petani yang menjadi kerisauan SYL adalah terbatasnya dukungan permodalan petani, utamanya dari lembaga keuangan formal. SYL berpandangan bahwa terbatasnya permodalan petani menjadi salah satu penyebab petani dan usaha pertanian skala kecil sulit untuk bisa “naik kelas” (baca: berkembang). Dan petani yang tidak pernah “naik kelas” maka tidak akan pernah menjadi petani yang mandiri.





“

*Salah satu kendala yang dihadapi petani untuk mengembangkan usaha adalah modal. Kementan membantu hal tersebut dengan memfasilitasi akses KUR. Oleh karenanya, manfaatkan program KUR Pertanian ini dengan baik karena dapat mendorong petani agar naik kelas dengan budi daya pertanian mereka*

”

**Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL)-  
Jakarta**

Upaya mendorong agar petani dan usaha pertanian skala kecil dapat “naik kelas” dan mandiri terkandung dalam *tagline* yang dirancang SYL dalam mendorong pembangunan pertanian, yaitu Maju, Mandiri, Modern. “Naik Kelas” adalah pengejawantahan dari kata “Maju” yang dimaknai sebagai suatu kondisi yang senantiasa harus bergerak maju dan pantang untuk mundur; sementara kemandirian jelas merupakan terjemahan eksplisit dari kata “Mandiri” yang salah satu harapannya adalah mewujudkan kemandirian petani dalam menjalankan usaha taninya, termasuk dalam pembiayaan usahataniannya dengan memanfaatkan sumber pembiayaan dari non APBN. Terwujudnya petani yang dapat “naik kelas” dan mandiri, tentu diharapkan dapat berkesinambungan (tidak hanya sesaat). Untuk itu, pemanfaatan teknologi modern harus menjadi suatu kebutuhan agar petani dapat mendorong peningkatan produktivitas, kualitas, dan pemasaran hasil pertaniannya.

Memahami dukungan permodalan sebagai salah satu instrumen penting dalam pembangunan pertanian, sejak awal SYL berencana mengoptimalkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai salah satu sumber pembiayaan Kementerian Pertanian (Kementan) dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian. KUR yang diintroduksikan pemerintah sejak 2007 memang diperuntukkan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di semua sektor, termasuk sektor pertanian. Sasaran KUR adalah debitur perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha produktif dan layak, namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum

cukup, yang selama ini menjadi kendala utama petani untuk akses pada kredit. Salah satu tujuan KUR adalah meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif, utamanya usaha mikro, kecil dan menengah. Sektor pertanian merupakan salah satu sasaran skema KUR.

Pandemi Covid-19 yang terjadi di awal 2020, dalam perkembangannya ternyata menjadi momentum optimalisasi pemanfaatan KUR di sektor pertanian. Momentum tersebut diperoleh dari adanya *refocusing* anggaran di seluruh kementerian/lembaga, termasuk Kementan, untuk pembiayaan penanggulangan Covid-19 dan kebijakan keringanan pembayaran pinjaman KUR bagi UMKM (debitur KUR) yang terdampak Covid-19. Dalam perkembangannya, selama masa pandemi Covid-19, KUR juga digunakan oleh pemerintah sebagai instrumen untuk menjaga UMKM tetap berproduksi dan membantu para pekerja di sektor jasa dan industri yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) untuk membuka usaha sendiri, termasuk usaha pertanian. Momentum ini dengan jeli dimanfaatkan oleh SYL untuk mendorong Direktorat Jenderal dan Badan (Ditjen/Badan) di Kementerian Pertanian untuk memanfaatkan KUR dalam pelaksanaan program dan kegiatannya.



“KUR bisa membuat pelaku usaha menjadi lebih berkembang dan saya selalu katakan pertanian itu bicara lapangan kerja dan dengan adanya KUR, roda perekonomian dasar masyarakat kembali bergerak saat pandemi ini. Dengan penggunaan KUR, maka akselerasinya pertanian kita jauh lebih kuat dan jauh lebih cepat. Dengan begitu, kesejahteraan petani juga akan meningkat”

Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL)  
Jakarta

Melalui strategi pembagian target penyerapan KUR di masing-masing Ditjen/Badan lingkup Kementan, realisasi penyaluran KUR di sektor pertanian tahun 2020 (Rp55,30 triliun) dan 2021 (Rp85,62 triliun) melampaui target yang ditetapkan yang masing-masing ditetapkan sebesar Rp50 triliun (2020) dan Rp70 triliun (2021), dan melonjak tajam dibandingkan realisasi KUR 2019 yang sebesar Rp37 triliun. Selain peningkatan secara nominal, jumlah debitur KUR sektor pertanian juga mengalami peningkatan yang besar dari sekitar 1,4 juta debitur (2019) menjadi 1,9 juta debitur (2020) dan 2,6 juta debitur (2021). Sementara itu, Gambar 1 memperlihatkan bahwa hingga periode 6 Desember 2022 realisasi penyaluran KUR di sektor pertanian tahun 2022 mencapai Rp 104,6 triliun telah melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp 90 triliun dengan jumlah debitur mencapai 2,54 juta debitur. Peningkatan jumlah debitur dapat dimaknai pelaku UMKM pertanian (termasuk petani) yang terlayani KUR semakin banyak dan hal ini merupakan indikasi awal upaya mewujudkan petani “naik kelas” dan mandiri mulai terwujud.



Gambar 1. Target, Realisasi dan Jumlah Debitur Penyaluran KUR Pertanian, 2020-2022

Sumber: SMI Ditjen Perben Kemenkeu (Data Tahun 2022 per 6 Desember 2022)

Kinerja penyaluran KUR yang sangat signifikan tersebut tidak lepas dari upaya-upaya serius dan sistematis yang telah dilakukan jajaran Kementerian Pertanian dalam mengawal dan memastikan target penyaluran KUR dapat dicapai. Upaya-upaya tersebut diantaranya adalah sosialisasi skema KUR yang sangat masif melalui jaringan dinas pertanian pada tingkat kabupaten/kota hingga kelompok tani, identifikasi prospektif calon penerima KUR sektor pertanian dan sinergi dengan bank penyalur KUR, serta pendampingan yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian.



Keberhasilan manajemen SYL dalam mendorong penyerapan KUR di sektor pertanian secara berkesinambungan perlu diketahui dan menjadi pembelajaran bagi para pemangku kepentingan terkait dan masyarakat luas. Untuk itu, uraian lebih lanjut dalam buku ini menyajikan kiat dan strategi manajemen SYL yang lebih detail yang dikemas dalam urutan Bab sebagai berikut: (a) Mewujudkan Petani Naik Kelas dan Mandiri Secara Berkelanjutan; (b) KUR sebagai Energi Pembangunan Pertanian; (c) KUR Bergerak, Petani Tergerak; (d) Pembelajaran Manajemen SYL; dan (e) Penutup.

# RAPAT KERJA NASIONAL PEMBANGUNAN PERTANIAN TAHUN 2021

Istana Negara, 11 Januari 2021

## II. MEWUJUDKAN PETANI NAIK KELAS DAN MANDIRI SECARA BERKELANJUTAN

### Pertanian Maju, Mandiri, Modern

Pertanian Maju, Mandiri, Modern; bukan hanya sekedar *tagline*, namun mempunyai makna yang dalam dan luas. Ketiga kata tersebut apabila dicermati lebih lanjut merupakan inti dalam proses pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Secara ringkas makna pertanian Maju, Mandiri, Modern, dapat diuraikan berikut ini.

**Pertanian Maju** secara sederhana dijelaskan oleh SYL sebagai suatu proses yang terus maju dan tidak boleh mundur. Penjelasan sederhana tersebut sejalan dengan makna semantik dari kata maju yang berarti progresif, tumbuh dan berkembang terus-menerus untuk menjadi lebih baik dalam mencapai tujuan ideal. Dalam konteks pembangunan, tujuan ideal itu ialah peradaban tinggi yang dalam konstitusi Indonesia didefinisikan sebagai kehidupan masyarakat yang cerdas, sejahtera, dan berkeadilan sosial. Pertanian *maju* bersifat dinamik progresif dalam arti terus-menerus tumbuh berkembang semakin baik dalam mewujudkan kesejahteraan petani dan masyarakat secara umum. Dalam konsep pembangunan, maju adalah prinsip perbaikan terus menerus (*continuous improvement*). Dalam konteks ini, inovasi teknologi yang mampu merespons permasalahan yang muncul dalam praktik pembangunan pertanian berperan sangat penting. Dengan demikian, *maju* tercermin pada kemampuan sektor pertanian berkembang untuk memenuhi perannya dengan dukungan teknologi inovatif guna mewujudkan kedaulatan pangan,

kemandirian pangan dan gizi, dan kesejahteraan petani serta pelaku usaha agribisnis. Ringkasnya, pertanian maju adalah yang berhasil mewujudkan tujuannya secara bertahap dan berkelanjutan.

**Pertanian mandiri** adalah pertanian yang resilien (tangguh) dan mampu tumbuh secara berkelanjutan melalui pemanfaatan sumber daya domestik secara optimal dan lingkungan strategis global berdasarkan kepentingan nasional. Kemandirian berarti kedaulatan dalam menentukan pilihan dan kebijakan. Pertanian mandiri dapat dicerminkan oleh: (1) kemandirian dalam proses pembangunan pertanian; (2) kemandirian dalam pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat; dan (3) kemandirian petani dalam melaksanakan usahataniya. Petani sebagai pelaku utama dalam pembangunan pertanian, juga didorong untuk memiliki kemandirian dalam melaksanakan usahataniya sehingga dapat meningkatkan daya saing melalui peningkatan produktivitas, mutu dan kualitas hasil produksi, termasuk dalam peningkatan kemampuan petani mengakses pasar dan sumber permodalan, baik yang berasal dari pemerintah maupun non pemerintah seperti KUR.

Kemandirian adalah salah satu penanda kemajuan. Selain bernilai *intrinsik*, kemandirian juga bernilai *instrumental* dalam arti berfungsi sebagai strategi atau instrumen pembangunan. Dalam konteks ini, kemandirian pangan adalah kemampuan negara dan bangsa dalam memproduksi pangan yang beraneka ragam yang dapat menjamin pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia, sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat. Melalui implementasi konsep kemandirian pangan, Indonesia sebagai bangsa diharapkan mampu menyediakan pangan dan gizi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat berbasis sumber daya lokal, dan mampu menangkal dampak gejolak pasokan dan harga pangan di pasar internasional. Dalam hal ini, kemandirian adalah instrumen untuk kemajuan dan kekokohan sebagai bangsa.

Makna semantik kata **Modern** berarti terbaru, kekinian, dan sesuai dengan tuntutan kehidupan dalam pergaulan dunia yang terbuka. kebalikan dari *modern* ialah tradisional, konservatif, konvensional, kuno atau lama. Dengan demikian, lawan makna dari Pertanian Modern ialah Pertanian Tradisional, Pertanian Konservatif, Pertanian Konvensional, atau Pertanian Kuno. Modernisasi adalah proses

pergeseran sikap dan mentalitas sebagai warga masyarakat untuk dapat hidup sesuai dengan tuntutan masa kini. Modernisasi pertanian berarti perubahan dari sistem pertanian tradisional, konservatif, konvensional, kuno, atau lama ke sistem pertanian berbasis teknologi mutakhir dan sesuai dengan tuntutan zaman dalam konteks global. Dalam konteks perekonomian dan budaya terbuka, pertanian modern berarti pula pertanian yang mampu bersaing terbuka.



Frasa modern lazim digunakan sebagai penciri sikap dan mentalitas masyarakat yang memiliki kemampuan dalam penciptaan dan penguasaan teknologi inovatif. Modernisasi tercermin dari perubahan sikap dan mentalitas masyarakat dalam menguasai dan memanfaatkan kemajuan teknologi dan kelembagaan yang dipergunakan dalam proses produksi, pengolahan hasil, dan distribusi/pemasaran dalam suatu rangkaian alur sistem agribisnis. Fungsi utama modernisasi pertanian ialah sebagai instrumen untuk mewujudkan pertanian maju dan mandiri. Pertanian maju karena melakukan inovasi teknologi dan kelembagaan yang mampu meningkatkan kapasitas, produktivitas, dan efisiensi usaha pertanian. Pertanian menjadi mandiri karena inovasi yang dilakukan mampu mengurangi ketergantungan pasokan input, modal, dan pemasaran pada pihak luar serta meningkatkan bagian nilai tambah bagi para petani pelaku usaha.

Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa pertanian Maju, Mandiri, Modern, merupakan penanda arah pembangunan pertanian yang berkaitan satu dengan yang lain. Pertanian yang senantiasa maju

(baca: tumbuh dan berkembang) merupakan prasyarat wajib untuk dapat menuju pertanian yang mandiri. Dan untuk mewujudkan pertanian yang maju dan mandiri, perlu didukung inovasi teknologi yang senantiasa berkembang.

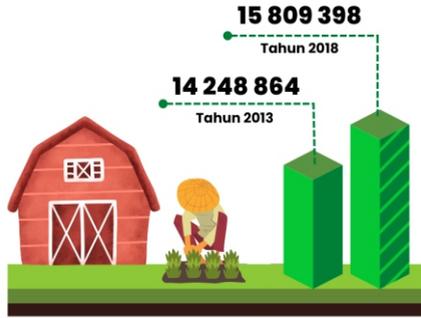


### Petani (Harus) “Naik Kelas”

Seperti telah dijelaskan di atas, pertanian maju tidak hanya sekedar mendorong produksi pertanian untuk senantiasa meningkat, guna memenuhi kebutuhan yang juga semakin meningkat. Pertanian maju juga mencakup upaya untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Dalam berbagai kesempatan SYL senantiasa mengingatkan bahwa upaya pemerintah untuk mendorong peningkatan produksi pertanian harus diikuti dengan peningkatan kesejahteraan petani. Bukanlah suatu keberhasilan, apabila upaya peningkatan produksi dapat diwujudkan, namun petaninya tidak mengalami peningkatan kesejahteraan. Situasi seperti ini sering disebut sebagai pembangunan yang kurang berpihak ke petani atau narasi yang lebih keras menyebutnya pembangunan yang justru mengeksploitasi petani. Hal ini tentu tidak boleh terjadi. Terkait hal ini SYL menekankan bahwa semua program dan kegiatan Kementerian Pertanian harus bermuara kepada peningkatan kesejahteraan petani atau narasi sederhananya petani harus “naik kelas”.

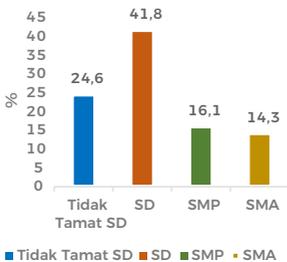
Indikator yang menunjukkan petani telah “naik kelas” dapat dilihat apabila terjadi pembalikan terhadap ciri umum petani di Indonesia. Ada beberapa ciri umum petani Indonesia yang melekat (*inheren*) pada usaha pertanian dan sudah berlangsung sejak bertahun-tahun lamanya. **Pertama**, usaha pertanian didominasi oleh pertanian skala kecil dan masih berusaha sendiri-sendiri sehingga tidak mampu memanfaatkan prinsip skala ekonomi. Berdasarkan data Survey Pertanian Antar Sensus (SUTAS) 2018, BPS melaporkan pada tahun

2018 terdapat 27,68 juta rumah tangga usaha pertanian (RTUP). Dari jumlah tersebut, RTUP yang mengusahakan lahan di bawah 0,5 hektar atau disebut petani gurem sebanyak 15,81 juta unit. Jumlah RTUP gurem ini meningkat 10,95% dibandingkan lima tahun sebelumnya (2013) sebesar 14,25 juta unit ( Gambar 2).

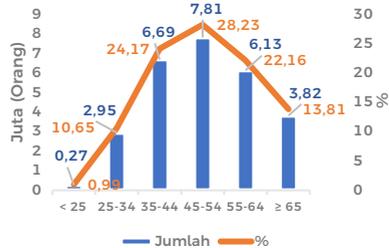


Gambar 2. Jumlah Rumah Tangga Petani Gurem  
Sumber : SUTAS BPS (2018)

**Kedua**, tingkat pendidikan petani secara umum relatif rendah. Berdasarkan data SUTAS 2018 BPS, tingkat pendidikan petani masih didominasi Tamat Sekolah Dasar (SD) sebesar 41,8%; diikuti tidak Tamat SD (24,6%), Tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar 16,1% dan Tamat Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 14,3% ( Gambar 3). **Ketiga**, usia petani didominasi oleh kelompok berusia diatas 55 tahun. Berdasarkan SUTAS 2018 BPS, kelompok usia petani diatas 55 tahun mencapai 35,97%. Kombinasi antara dominasi petani berpendidikan rendah dan berusia tua, akan semakin menyulitkan untuk mengenalkan teknologi baru; karena keinginan untuk menghindari resiko usaha semakin kuat.

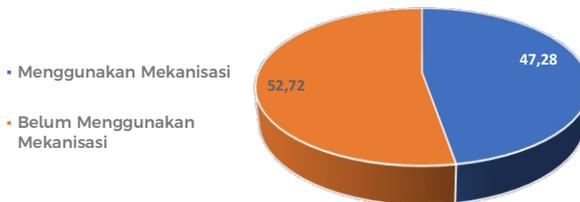


Gambar 3 Tingkat pendidikan petani tahun 2018  
Sumber : SUTAS BPS (2018)



Gambar 4 Jumlah petani menurut kelompok usia tahun 2018  
Sumber : SUTAS BPS (2018)

**Keempat**, konsekuensi dari skala usaha yang kecil, maka kemampuan permodalan petani juga umumnya relatif terbatas dan tidak *bankable*. Kebutuhan permodalan petani kecil sebagian besar masih dipenuhi dari lembaga nonformal (baca: pelepas uang). **Kelima**, penggunaan mekanisasi dan teknologi, selain mekanisasi, masih relatif rendah yaitu baru 52,72% dan sebarannya tidak merata antar provinsi. Sebagai contoh, di Jawa Tengah RTUP yang tidak menggunakan mekanisasi dan teknologi, selain mekanisasi, hanya 39,24%, namun di Papua mencapai 93,78%.



**Gambar 5** Persentase penggunaan mekanisasi dan teknologi oleh petani  
**Sumber: SUTAS BPS (2018)**

Proses pembalikan ciri umum petani Indonesia di atas harus dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan. Harapannya, petani yang “naik kelas” akan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Penguasaan dan/atau pengusahaan lahan per RTUP semakin luas yang ditunjukkan dengan jumlah petani gurem semakin turun dan jumlah petani yang menguasai diatas 2 ha semakin meningkat. Pengusahaan lahan dapat diperluas melalui rekayasa sosial usaha berkelompok, salah satunya dalam bentuk korporasi petani. Data SUTAS 2018 BPS menunjukkan jumlah RTUP yang menguasai lahan di bawah 2 ha mencapai 90%.
- b. Tingkat pendidikan petani akan lebih banyak didominasi Tamat SMA untuk menggantikan petani yang hanya berpendidikan setingkat SMP ke bawah.
- c. Jumlah petani berusia muda semakin meningkat untuk menggantikan generasi petani yang berusia tua.
- d. Konsekuensi dari penguasaan dan pengusahaan lahan yang semakin luas maka kemampuan permodalan diharapkan juga akan semakin meningkat dan semakin banyak yang terfasilitasi lembaga keuangan formal.
- e. Kombinasi dari perubahan butir (a) sampai (d) akan meningkatkan efisiensi usahatani melalui penerapan prinsip

skala ekonomi (*economies of scale*) yang berimplikasi terhadap meningkatnya pemanfaatan teknologi unggul, termasuk penggunaan alat dan mesin pertanian dan digital teknologi pertanian.



### Petani (Harus) Mandiri

Petani mandiri adalah petani yang mampu memanfaatkan secara optimal sumber daya alam, tenaga, modal, dan teknologi, termasuk dinamikanya, petani mandiri umumnya mampu mengatasi berbagai permasalahan dan kreatif mencari solusi untuk mengatasi tantangan yang ada. Kemampuan tersebut tercipta karena petani mandiri umumnya mempunyai keleluasaan otoritas dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya. Petani mandiri yang sejahtera diharapkan akan semakin banyak di Indonesia, sehingga pemerintah (baca: Kementan) dapat menjalankan fungsi fasilitator dan regulator dengan lebih optimal.

Terkait dengan pemahaman petani mandiri, tidak sedikit yang berpendapat bahwa petani Indonesia selama ini sudah mandiri. Mereka selama ini tetap menjalankan usaha taninya walaupun dalam keterbatasan. Pemahaman petani mandiri dalam keterbatasan inilah yang akan diubah menjadi petani mandiri yang sejahtera. Upaya perubahan tersebut tentu membutuhkan waktu dan proses yang berkesinambungan. Menurut Prof. Sumardjo (Guru Besar IPB University), petani mandiri mempunyai tiga ciri utama, yaitu daya saring, daya saing, dan daya sanding. Daya saring hanya dimiliki sumber daya manusia (baca: petani) dengan wawasan yang luas, salah satunya dengan penguasaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)

dan akses terhadap penyuluhan berbasis digital (*cyber extention*). Daya saing mempunyai pengertian bahwa sumber daya manusia pertanian harus mampu bekerja, bertindak secara efektif, efisien, dan bermutu. Daya sanding mempunyai pengertian petani mampu dipercaya dan dipercayai oleh mitra maupun jejaring kerja.

Upaya untuk mewujudkan petani mandiri memerlukan beberapa instrumen kebijakan, seperti reforma agraria, pembiayaan usaha pertanian, penyuluhan pertanian, serta penelitian dan pengembangan. Kebijakan reforma agraria diperlukan untuk legalisasi dan/atau menambah penguasaan lahan petani; sehingga petani menjadi *bankable*. Kebijakan pembiayaan pertanian utamanya terkait dengan kredit usaha yang mudah diakses oleh petani (contohnya KUR). Kebijakan penyuluhan utamanya ditujukan untuk memberdayakan petani melalui pendampingan dan bimbingan secara intensif. Kebijakan penelitian dan pengembangan merupakan keharusan karena kunci keberlanjutan usaha pertanian adalah inovasi yang senantiasa berkembang.

“*Persyaratan KUR harus dipermudah agar bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan nilai tambah pasca panen sehingga program ini semakin dirasakan manfaatnya oleh petani*”  
**Presiden Joko Widodo**  
Jakarta



Dari keempat instrumen kebijakan tersebut, KUR menjadi salah satu instrumen yang dioptimalkan penggunaannya untuk sektor pertanian selama tiga tahun terakhir oleh manajemen SYL. Pertimbangan utamanya karena skema dan jenis pinjaman KUR sangat sesuai untuk mendukung program strategis di Kementan. Sebagai contoh, selain dapat digunakan untuk mendukung pembiayaan usaha tani, KUR juga dapat digunakan oleh penggilingan padi untuk pembelian gabah petani (program Komando Strategi Penggilingan Padi) serta pembelian alat dan mesin pertanian melalui program Taksi Alsintan.

## BOX 1: Menko Airlangga: Permudah Syarat KUR, Pemerintah Optimalkan Peran UMKM

### Menko Airlangga: Permudah Syarat KUR, Pemerintah Optimalkan Peran UMKM

29 December 2021 18:37 PM

**JAKARTA** - Menyambut tahun 2022, Pemerintah meyakini Indonesia berada pada momentum baik bagi percepatan pemulihan ekonomi nasional. Juga menjadi kesempatan memperluas pembiayaan usaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) sehingga aktivitas usaha menguat dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui Sekretariat Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM, Rabu (29/12), menyelenggarakan Rapat Koordinasi guna mengevaluasi pelaksanaan penyaluran KUR tahun 2021 dan memutuskan berbagai kebijakan yang akan menjadi dasar pelaksanaan program KUR tahun 2022.

"KUR dibutuhkan dalam percepatan pemulihan ekonomi pada masa pandemi Covid-19, sehingga diperlukan adanya peningkatan plafon KUR dan kemudahan persyaratan KUR," tutur Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM.

Lebih lanjut dalam Rapat Koordinasi Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM diputuskan plafon KUR tahun 2022 ditingkatkan menjadi sebesar Rp 373,17 triliun dengan suku bunga KUR tetap sebesar 6%. Mempertimbangkan tren penurunan *cost of fund* dan peningkatan efisiensi *Over Head Cost* (OHC) suku bunga KUR, maka Pemerintah juga menurunkan subsidi bunga KUR tahun 2022 untuk KUR Super Mikro sebesar 1%, KUR Mikro turun 0,5%, dan KUR PMI turun 0,5%.

"Melalui perubahan kebijakan KUR, Pemerintah menunjukkan perhatian yang besar kepada UMKM dengan memberikan persyaratan KUR yang lebih mudah dan terjangkau sehingga UMKM dapat mengoptimalkan perannya sebagai penggerak ekonomi nasional," ungkap Menko Airlangga.

**Relaksasi kebijakan KUR telah berpengaruh terhadap permintaan KUR yang sudah melampaui pola normalnya dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.** Permintaan KUR menunjukkan peningkatan dari rata-rata per bulan sebesar Rp 11,7 triliun pada tahun 2019 (pra pandemi Covid-19) menjadi Rp 16,5 triliun pada tahun 2020 dan Rp 23,7 triliun pada tahun 2021.**(bas/fen)/diringkas penyelaras.**

### III. KUR SEBAGAI SALAH SATU ENERGI PEMBANGUNAN PERTANIAN

#### KUR sebagai Mesin Penggerak Perekonomian Nasional

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah terbukti sebagai sektor penyelamat pada saat perekonomian nasional menghadapi guncangan hebat, seperti krisis ekonomi 1998 dan yang terkini pandemi Covid-19. Urgensi peran UMKM tersebut menjadi perhatian utama Pemerintah untuk dapat memberikan dukungan bagi UMKM, salah satunya melalui akses pembiayaan KUR. Keseriusan pemerintah ditunjukkan dengan semakin mempermudah akses dan memperluas cakupan KUR sejak diluncurkan tahun 2007. Secara ringkas, evolusi KUR menjadi sumber pembiayaan yang semakin mudah diakses oleh UMKM, termasuk di sektor pertanian, diuraikan berikut ini:

- a. Selama periode 2007-2014, KUR menggunakan skema Imbal Jasa Penjaminan (IJP). Dalam skema ini, subsidi yang diberikan pemerintah berupa imbal jasa penjaminan yang dibayarkan kepada Perusahaan Penjamin dalam rangka kegiatan usaha penjaminan. Dana IJP-KUR dialokasikan dalam APBN dan/atau APBN-Perubahan. Dalam pelaksanaannya, pemerintah membayar jasa penjaminan KUR sebesar 70% dan sisanya (30%) ditanggung bank penyalur KUR. Selama skema ini dijalankan, penyaluran KUR berfluktuasi karena pemerintah tidak menetapkan target penyaluran KUR. Selain itu, hasil evaluasi menunjukkan skema IJP-KUR masih terdapat beberapa kelemahan, sehingga dihentikan sementara per 31 Desember 2014.



“*Karena itu penyaluran KUR pertanian terus kita dorong. Mengapa demikian? karena KUR terbukti menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi nasional, dimana saat ini telah dinikmati oleh 7,5 juta debitur dan permintaannya terus meningkat*”

**Menko Perekonomian Airlangga Hartanto**

- b. Periode 2015-2020 dilakukan perbaikan terhadap skema KUR dari skema Imbal Jasa Penjaminan (IJP) menjadi skema subsidi bunga/margin. Dengan skema ini, Pemerintah menanggung sebagian bunga yang ditanggung oleh debitur dalam bentuk subsidi bunga. Subsidi bunga diberikan berdasarkan selisih antara suku bunga kredit dikurangi dengan suku bunga yang ditanggung oleh debitur. Dalam pelaksanaannya, skema subsidi bunga/margin mengalami perkembangan yang menarik untuk diketahui, yaitu:
- i. Pada awal pelaksanaannya, Pemerintah melalui Komite Kebijakan menetapkan suku bunga KUR sebesar 12%. Namun, setelah beberapa bulan berjalan, Pemerintah menurunkan suku bunga KUR menjadi sebesar 9%, dan diturunkan lagi menjadi 6% efektif per tahun melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.
  - ii. Selain fokus terhadap penurunan suku bunga KUR, Komite Kebijakan juga berfokus pada penyaluran KUR ke sektor produksi; karena sejak KUR diluncurkan, penyalurannya didominasi oleh debitur KUR sektor perdagangan/ritel. Pengertian sektor produksi adalah sektor yang menambah jumlah barang dan/atau jasa sehingga dapat memberikan efek pengganda (*multiplier effect*) bagi perekonomian. Sektor tersebut diantaranya pertanian, perikanan, industri pengolahan, konstruksi, jasa-jasa dan lainnya. Untuk mendorong penyaluran ke sektor non perdagangan (baca: sektor produksi), Komite Kebijakan pada bulan Januari 2017 menetapkan target KUR untuk disalurkan ke sektor produksi minimal 40%.
  - iii. Target minimal penyaluran KUR ke sektor produksi tersebut terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya, yaitu minimal 50% di tahun 2018, dan minimal 60% di tahun 2019. Memperhatikan kinerja penyaluran KUR sektor produksi yang masih belum optimal, maka pada tahun 2020 target penyaluran KUR sektor produksi tetap sebesar minimal 60% dari total penyaluran.

2007-2014	2015	2016	2017	2018	2019
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skema Imbal Jasa Penjaminan (IJP)= 3,25%</li> <li>• 33 Bank Pelaksana, 4 Penjamin</li> <li>• Total Penyaluran Rp 178 T dengan 12,4 juta akad</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skema subsidi bunga</li> <li>• Suku Bunga 12%</li> <li>• 7 Penyalur KUR, 2 Penjamin KUR</li> <li>• Total Penyaluran KUR sebesar Rp 22,75 T kepada 1 juta debitur</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skema subsidi bunga</li> <li>• Suku Bunga 9%</li> <li>• 27 Penyalur KUR, 6 Penjamin KUR</li> <li>• Total penyaluran KUR sebesar Rp 94,4 T kepada 4,3 juta debitur (94,4% dari target)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skema subsidi bunga</li> <li>• Suku Bunga 9%</li> <li>• 34 Penyalur KUR, 4 Penjamin KUR</li> <li>• Total penyaluran KUR sebesar Rp 96,7 T kepada 4 juta debitur (90,7 dari target)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skema subsidi bunga</li> <li>• Suku Bunga 7%</li> <li>• 44 Penyalur KUR, 11 Penjamin KUR dan 14 Pemerintah Pusat</li> <li>• Total penyaluran KUR sebesar Rp 120,35 T (100,3% dari target penyaluran Rp 120 T)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Skema subsidi bunga</li> <li>• Suku Bunga 7%</li> <li>• 44 Penyalur KUR, 11 Penjamin KUR dan 14 Pemerintah Pusat</li> <li>• Total penyaluran KUR sebesar 140,1 T dari target Rp 140 T .</li> </ul>

**Gambar 6. Evolusi Kredit Usaha Rakyat (KUR)**  
**Sumber: Kemenko Perekonomian**



- c. Akibat ditetapkannya pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional pada bulan Maret 2020, menjadi suatu tantangan tersendiri untuk dapat menyalurkan KUR secara tepat dan cepat di tengah kebutuhan pembiayaan UMKM yang masih sangat tinggi. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan KUR pada masa pandemi Covid-19 sebagai berikut:
- Diberikan tambahan subsidi bunga sebesar 6%, sehingga beban bunga yang ditanggung debitur KUR selama masa pandemi adalah 0% sampai dengan 31 Desember 2020;
  - Relaksasi KUR berupa penundaan angsuran pokok dan kemudahan administrasi restrukturisasi KUR;
  - Perpanjangan pemberian tambahan subsidi bunga/margin KUR

dengan besaran tambahan subsidi bunga/margin sebesar 3% untuk periode 1 Januari sampai 31 Desember 2021;

- iv. Perluasan penyaluran KUR kepada pekerja terkena PHK dan kelompok ibu rumah tangga melalui KUR Super Mikro. Fiturnya sangat menarik karena KUR Super Mikro ditetapkan dengan suku bunga 0% sampai dengan 31 Desember 2020 dan 6% setelah 31 Desember 2020 dengan maksimum kredit sebesar Rp10 juta.

**Kebijakan KUR Masa Pandemi Covid-19 (April 2020 s.d Desember 2021)**

- Diberikan tambahan subsidi Bunga sebesar 6%, sehingga beban bunga yang ditanggung Debitur KUR selama masa pandemi adalah 0% sampai dengan 31 Desember 2020.
- Penundaan target penyaluran KUR sektor produksi tahun 2020-2021.
- Relaksasi KUR berupa penundaan angsuran pokok dan kemudahan administrasi restrukturisasi KUR.
- Perpanjangan pemberian tambahan subsidi bunga/margin KUR dengan besaran tambahan subsidi bunga/margin sebesar 3% untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021

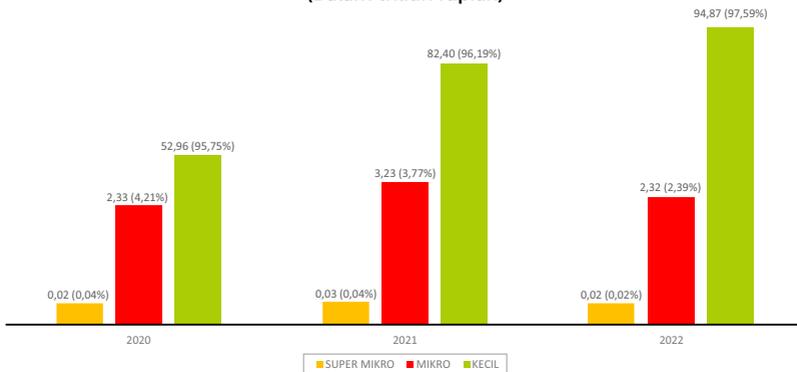
**Tabel 1 Kebijakan KUR masa pandemi Covid-19**

- d. Periode 2021 sampai saat ini, KUR diposisikan sebagai bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Untuk itu, kebijakan KUR masih diarahkan untuk menyelamatkan sekaligus menumbuhkan UMKM, seperti:
  - i. Memperpanjang pemberian tambahan subsidi bunga/margin kepada debitur KUR yang terdampak usahanya sampai dengan 31 Desember 2021. Selain itu, kebijakan penundaan angsuran pokok dan pemberian relaksasi berupa perpanjangan jangka waktu dan penambahan plafon kredit juga tetap diberikan kepada debitur;
  - ii. KUR Super Mikro, KUR Mikro, dan KUR Kecil dengan nilai plafon kredit maksimal Rp100 juta **tidak dipersyaratkan** adanya agunan tambahan (hanya diperbolehkan agunan pokok berupa usaha yang dibiayai dari KUR tersebut);

		KUR SUPER MIKRO	KUR MIKRO	KUR KECIL
FITUR	Plafon	s.d 10 juta rupiah	lebih dari 10 juta rupiah - 100 juta rupiah	lebih dari 100 juta rupiah - 500 juta rupiah
	Suku Bunga	6% efektif per tahun		
	Jangka Waktu	Maksimal 5 tahun		
SYARAT	Lama Usaha	Tidak ada pembatasan	Minimal 6 bulan	
	Dokumen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KTP dan KK</li> <li>- Surat Keterangan Usaha (Sekurang-kurangnya dari Kepala Desa/Kelurahan)</li> <li>- NPWP</li> </ul>		
	Agunan	Tidak dibutuhkan		Dibutuhkan sesuai persyaratan dari Lembaga Penyalur KUR

Tabel 2 Fitur KUR Menurut Jenisnya Tahun 2022

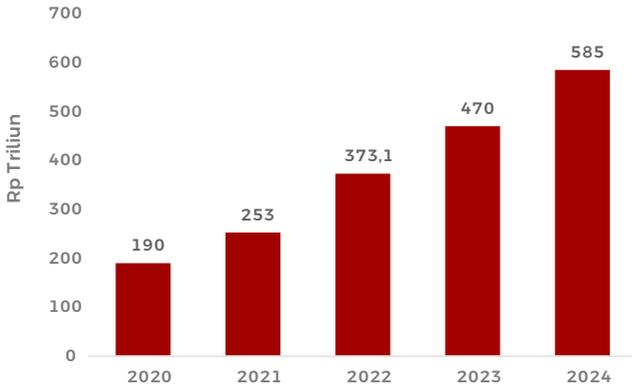
**PERKEMBANGAN REALISASI PENYALURAN KUR SEKTOR PERTANIAN BERDASARKAN JENIS KUR TAHUN 2020-2022 (Dalam triliun rupiah)**



Gambar 7 Perkembangan Realisasi Penyaluran KUR Sektor Pertanian Berdasarkan Jenis KUR Tahun 2020-2022 (Dalam Triliun Rupiah)

- iii. Jumlah kredit yang diterima debitur sesuai dengan nilai akad yang ditandatangani di semua skema KUR (tidak diperbolehkan adanya potongan dalam bentuk apapun);
- iv. Ketentuan komoditas pada KUR Khusus (kelompok usaha bersama dalam bentuk klaster dengan menggunakan mitra usaha) diperluas untuk sektor pertanian, perburuan, dan kehutanan; kelautan dan perikanan; industri pengolahan; konstruksi; pertambangan garam rakyat; pariwisata; jasa produksi dan/atau produksi lainnya.

- e. Pemerintah meningkatkan alokasi KUR nasional dari Rp190 triliun (2020) menjadi Rp253 triliun (2021) dan Rp373,17 triliun (2022). Pada tahun 2023 dan 2024 alokasinya direncanakan masing-masing sebesar Rp470 triliun dan Rp585 triliun.



**Gambar 8 Target Penyaluran KUR 2020 - 2024 (Rp Triliun)**

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) memahami para petani dan pelaku usaha sepanjang rantai pasok pertanian dan pangan terdampak oleh pandemi Covid-19, termasuk kesusahan dalam penyediaan pembiayaan usaha. Menteri SYL melihat kebijakan pemerintah di bidang pembiayaan UMKM ini dapat dimanfaatkan untuk pembangunan di sektor pertanian, termasuk petani dan peternak skala kecil. Menteri SYL mencetuskan ide, mengambil kebijakan, dan mengarahkan para pejabat Eselon I untuk merancang program dan kegiatan dengan memanfaatkan ketersediaan sumber pembiayaan KUR. Salah satu komponen program dan kegiatan yang dirancang tersebut memasukkan upaya peningkatan aksesibilitas dan kemudahan petani dan peternak dalam pemanfaatan KUR bagi pembiayaan usaha pertanian, untuk meningkatkan produktivitas, perluasan usaha, dan peningkatan pendapatan para petani dan peternak.



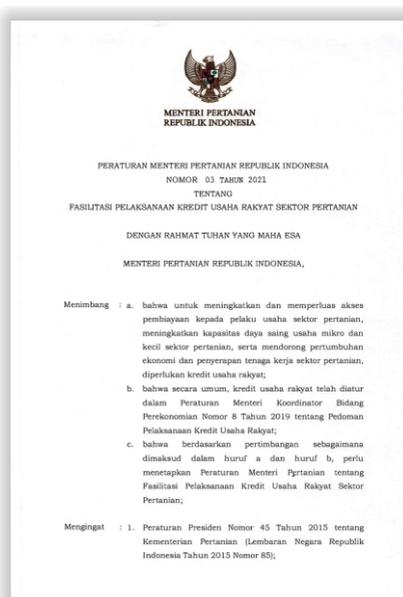
## Skim KUR sebagai Sumber Pembiayaan yang Berpihak ke Petani

Proses perubahan skim KUR yang semakin menguntungkan sektor pertanian, dimanfaatkan secara optimal oleh SYL, utamanya untuk mendukung pembiayaan usaha pertanian. Upaya ini didorong oleh SYL guna menjaga kinerja sektor pertanian tetap mampu tumbuh positif, meningkatkan produksi pangan untuk menjaga ketahanan pangan dan gizi, dan memelihara tingkat pendapatan petani. Beberapa perubahan kebijakan KUR yang menguntungkan sektor pertanian, antara lain: (a) tingkat suku bunga/margin pinjaman yang rendah (6%); (b) tidak dipersyaratkan agunan tambahan untuk pinjaman maksimal Rp100 juta; (c) alokasi minimum KUR untuk sektor produksi (sektor pertanian termasuk di dalamnya); dan (d) pembayaran pinjaman KUR yang fleksibel (bayar setelah panen atau angsuran bulanan) dan pilihan masa tenggang (*grace period*) yang sesuai untuk komoditas tanaman tahunan.

Berbagai perubahan kebijakan KUR yang sangat menguntungkan sektor pertanian tersebut, dalam pandangan SYL adalah suatu kesempatan yang tidak akan datang dua kali. Untuk itu, sebagai upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan KUR di sektor pertanian, Mentan SYL melakukan beberapa rekayasa cerdas berupa terobosan pemikiran dan kebijakan yang diuraikan secara ringkas berikut ini.

**Pertama**, Kementan menetapkan kebutuhan indikatif pembiayaan dan *grace period* setiap komoditas untuk dijadikan acuan oleh Bank Penyalur KUR. Usaha di sektor pertanian jenis dan karakteristiknya

cukup beragam, sesuai dengan komoditas utama yang dikembangkan. Keberagaman tersebut mengikuti kekhasan kesesuaian komoditas terhadap agro-ekosistem kawasan, struktur kebutuhan input usaha, umur tanaman, masa panen, pola panen, dan sifat produk. Kekhususan tersebut menyebabkan perbedaan kebutuhan investasi dan modal kerja, serta struktur dan postur biaya usahatani. Adanya sifat khas dari usaha agribisnis komoditas ini menentukan besaran dan kebutuhan pembiayaan serta plafon kredit usaha.



Gambar 9 Halaman Depan Permentan No. 03 Tahun 2021

Untuk membantu pihak Bank Penyalur KUR dalam menentukan besaran plafon kredit dan *grace period* dalam setiap usahatani, Menteri SYL mengeluarkan Permentan No. 03 tahun 2021 tentang Fasilitasi Pelaksanaan KUR Sektor Pertanian, yang memuat secara detail kebutuhan indikatif KUR dan *grace period* berbagai komoditas di empat sub sektor. Selain itu juga dicantumkan kebutuhan indikatif KUR dan *grace period* untuk usaha taksi alsintan. Informasi tersebut menjadi acuan atau referensi oleh pihak Bank dalam pengambilan keputusan penyaluran KUR di sektor pertanian





**Kedua**, Kementan mencari *off taker/avalis* bagi petani calon debitur KUR. Untuk meminimalkan risiko kredit macet dan memenuhi ketentuan Bank Indonesia (BI), setiap bank menerapkan prinsip-prinsip *prudential banking* dalam menilai calon debitur. Meskipun program KUR dirancang untuk memperlunak penerapan prinsip-prinsip *prudential banking*, akan tetapi petani masih kesulitan mengakses KUR, diantara penyebabnya adalah tidak ada kepastian pasar bagi produk yang dihasilkannya, petani tidak bisa menyediakan agunan tambahan, dan tidak lolos *BI Checking*. Untuk mengatasi hal tersebut, Mentan SYL memerintahkan setiap Eselon I untuk aktif mencari perusahaan *off taker*, atau lebih baik lagi perusahaan *off taker* sekaligus *avalis*. Petani yang bermitra dengan *off taker* akan lebih dipercaya dibanding yang tidak bermitra. Demikian juga, petani yang bermitra dengan *avalis*, proses persetujuan kreditnya akan lebih cepat, sehingga proses penilaian dan penyaluran KUR menjadi lebih cepat.

**Ketiga**, Kementan menjalin kerja sama dengan Bank Penyalur KUR. Dalam rangka meningkatkan pemanfaatan KUR oleh petani untuk meningkatkan kinerja usaha pertanian, Kementan menjalin kerja sama dengan Bank Penyalur KUR melalui penanda-tanganan Nota Kesepahaman antar Kementan dengan Bank Penyalur KUR, yaitu BRI, BNI, dan Bank Mandiri. Melalui kerja sama ini, Mentan SYL mengharapkan petani memperoleh kemudahan mendapatkan pembiayaan usaha dari Bank Penyalur KUR. Dalam Nota Kesepahaman tersebut disepakati beberapa hal, yaitu:

- a. Pemberdayaan kelembagaan petani melalui penguatan permodalan dan pendampingan;
- b. Pertukaran data mitra dan/atau binaan yang ingin mengajukan permohonan kredit UMKM, atau informasi lain yang diperlukan;
- c. Penyaluran fasilitas kredit dan produk serta jasa bank lainnya oleh bank kepada mitra dan/atau binaan Kementan secara langsung; dan
- d. Bentuk kerja sama dan layanan perbankan lainnya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.





“ Kami berterima kasih kepada pemerintah atas kesempatannya kepada BNI untuk berperan lebih aktif dalam mempercepat transformasi sektor agrikultur. Kami yakin program ini dapat membantu meningkatkan produksi pangan nasional. ”

**Royke Tumilaar, Direktur Utama BNI**



“ Pembiayaan KUR akan memberikan akses kredit berbunga rendah yang bisa digunakan petani untuk membeli bibit, pupuk, obat hama maupun alat pertanian lainnya. Hal ini sangat membantu petani dalam pengelolaan pertanian sehingga modal yang dimiliki petani bisa dimanfaatkan untuk melakukan usaha lainnya dan meningkatkan pendapatannya. ”

**Darmawan Junaidi,  
Direktur Utama Bank Mandiri**



“ Saat ini BRI telah memiliki 28.959 tenaga pemasar untuk menyalurkan KUR Pertanian, dimana angka ini meningkat drastis dibandingkan dengan jumlah tahun lalu sebesar 13.327 orang. Selain itu BRI memiliki 8.620 outlet dari Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu, BRI Unit dan Teras BRI yang melayani proses pengajuan KUR Pertanian dari masyarakat. ”

**-Sunarso, Direktur Utama Bank BRI-**

**Keempat**, Kementan melakukan pelatihan literasi keuangan dan fasilitasi akses KUR bagi petani milenial. Kegiatan pelatihan literasi keuangan sangat penting untuk membekali pengetahuan dan keterampilan petani dalam membuat keputusan yang tepat dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimilikinya. Melalui kegiatan literasi keuangan tersebut diharapkan setiap petani mampu membuat perencanaan keuangan, *cash flow*, maupun perencanaan pembiayaan, termasuk pinjaman. Kegiatan pelatihan ini menjadi salah satu prioritas karena Mentan SYL memandang bahwa petani *milenial* merupakan kekuatan baru yang sangat potensial menjadi penggerak utama (*prime mover*) dalam pembangunan pertanian yang maju, mandiri dan modern.

Untuk merealisasikan upaya tersebut, Kementan bekerja sama dengan *International Fund for Agricultural Development* (IFAD) melaksanakan Program YESS (*Youth Entrepreneurship and Employment Support Services*). Salah satu kegiatan utama Program YESS adalah melakukan pelatihan literasi keuangan kepada 120 ribu petani *milenial*. Diharapkan paling tidak 100 ribu petani *milenial* yang telah mendapat pelatihan tersebut berminat dan mampu mengakses sumber pembiayaan usaha dari KUR.



**Kelima,** Kementan mengajak pemerintah daerah (Pemda) bersama-sama melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan KUR di sektor pertanian. Pengalaman panjang SYL di birokrasi pemerintahan sebagai kepala daerah (lurah, camat, bupati, gubernur), menjadikan Mentan SYL paham betul bahwa peran Pemda sangat penting dalam menyukseskan setiap program pembangunan di daerah. Pemahaman pentingnya peran Pemda seperti itu, menghasilkan pemikiran Mentan SYL untuk mengajak Pemda terlibat aktif dalam pelaksanaan Program KUR, baik dalam pembinaan, pengawasan, maupun evaluasinya.

Pembinaan fasilitasi pelaksanaan KUR dilakukan oleh Kementan dan Pemda. Pembinaan oleh Kementan dilaksanakan Ditjen teknis (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, dan Peternakan dan Kesehatan Hewan) berkoordinasi dengan Ditjen Prasarana dan Sararan (PSP) sebagai *vocal point* implementasi program KUR di Kementan. Sedangkan pembinaan oleh Pemda dilaksanakan oleh Dinas terkait masing-masing (Dinas Provinsi, Dinas Kab/Kota). Untuk pengawasan pelaksanaan KUR dilakukan oleh Forum Koordinasi Pengawasan KUR yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan No 03/2021 tentang Fasilitasi Pelaksanaan KUR Sektor Pertanian, pasal 26). Indikator yang digunakan untuk evaluasi terhadap fasilitasi pelaksanaan KUR yaitu jumlah plafon KUR yang disalurkan, jumlah debitur yang menerima KUR, jumlah debitur yang berhasil mengalami graduasi, dan *Non Performing Loan* (NPL).





“*Saya kira program Pak menteri ini sangat bagus sekali. Terutama dalam mempercepat penyerapan KUR di provinsi kami. Saya yakin kalau petani kita sudah maju, Indonesia juga pasti maju.*”

**Barnabas N Orno,**  
Wakil Gubernur Provinsi Maluku

“

*Kami tidak menggunakan APBN. Kebijakan Presiden menyediakan KUR itu luar biasa.*”

**Sri Sumarni, Bupati Grobogan**



“*Pemanfaatan dan pengelolaan KUR di Kabupaten Grobogan sudah cukup baik. KUR dimanfaatkan dalam berbagai usaha tani hulu hilir di sektor pertanian, baik untuk usaha budidaya maupun usaha pasca panen, mulai komoditas padi, jagung, kedelai, bawang merah, tebu dan tembakau. Sesuai arahan Pak Menteri Pertanian (SYL), kedepan, kami akan lebih mendorong para petani dan UMKM untuk memanfaatkan KUR dalam pembiayaan usahatani. Harapannya KUR dapat membantu petani dalam memperkuat permodalan dalam mengembangkan usahatani.*”

**Sunanto, Kepala Dinas Pertanian**  
Kab. Grobogan

**Keenam**, Kementan melakukan pendampingan usahatani menuju kemitraan agribisnis *close loop*. Pendampingan usahatani saat ini tidak hanya dilakukan oleh penyuluh pemerintah, akan tetapi juga melibatkan penyuluh swadaya dan penyuluh swasta (perusahaan saprodi). Kolaborasi penyuluh dari berbagai pihak tersebut bertujuan untuk mengakselerasi terwujudnya korporasi petani. Ruang lingkup pendampingan meliputi pendampingan teknologi, pendampingan akses pasar, dan pendampingan KUR. Selain itu orientasi pendampingan saat ini adalah mengubah pola pikir petani menjadi seorang wirausaha yang kreatif dan inovatif dalam mengembangkan usahatani.

Petani didorong untuk bermitra dengan perusahaan *off taker* dengan model kemitraan *close loop*, yaitu model kemitraan agribisnis hulu sampai hilir yang dikembangkan dalam ekosistem dengan teknik budi daya *Good Agricultural Practices* (GAP), sistem logistik yang baik, serta jaminan pasar dan harga yang bersaing. Dengan model kemitraan agribisnis *close loop* tersebut diharapkan Bank Penyalur KUR lebih berani atau mudah memberi kepercayaan kepada petani calon potensial penerima KUR. Upaya ini akan meningkatkan volume penyaluran KUR di sektor pertanian. Bisnis model KUR Pertanian dapat dilihat pada Gambar 10.

## BISNIS MODEL KUR KEMITRAAN Manfaat Para Pihak



**Gambar 10. Bisnis Model KUR Pertanian**



**Ketujuh,** Kementan mengupayakan peningkatan akses petani pada sarana produksi melalui KUR. Sarana pertanian yang tidak mudah diakses petani secara finansial diantaranya alat mesin pertanian (alsintan) dan pupuk. Alokasi APBN untuk Kementan yang terbatas menyebabkan volume bantuan alsintan ke petani juga terbatas, sehingga Kementan mendorong dan memfasilitasi petani untuk mampu membeli alsintan yang diperlukan. Sedangkan untuk pupuk bersubsidi, pemerintah hanya mampu menyediakan 9,5 juta ton dari 25,18 juta ton yang dibutuhkan atau tersedia hanya 37,7%. Berdasarkan Permentan No. 10 Tahun 2022, mulai 1 Oktober 2022 pemerintah menetapkan hanya ada dua jenis pupuk bersubsidi, yaitu Urea dan NPK, dan hanya untuk usahatani sembilan komoditas yaitu padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, tebu rakyat, kopi, dan kakao.

Menyikapi hal tersebut, sementara penggunaan alsintan dan pupuk merupakan hal yang esensial bagi perluasan areal tanam dan peningkatan produktivitas, Mentan SYL mengusulkan alternatif kebijakan dalam pengelolaan KUR untuk pertanian kepada Presiden Joko Widodo, melalui **Surat No. 236/RC.110/M/09/2022 tertanggal 18 September 2022** yang isinya sebagai berikut:

- Untuk pengadaan alsintan oleh masyarakat, diusulkan plafon KUR ditingkatkan dari Rp 500 juta menjadi Rp 5 Miliar; bunga KUR diturunkan dari 6% menjadi 3%; sistem pembayaran setelah panen, dan DP dari 30% menjadi 5-10%.



- Untuk mendorong penggunaan pupuk non-subsidi dalam jumlah yang lebih besar, diusulkan bunga KUR untuk pupuk non-subsidi menjadi 1%; dan diberlakukan HET untuk pupuk non-subsidi agar disparitas dengan pupuk bersubsidi semakin kecil.
- Untuk merespons minat petani yang semakin meningkat dalam memanfaatkan KUR, diusulkan agar penyediaan plafon KUR sektor pertanian diperbesar.

Dengan usulan paket kebijakan tersebut diharapkan petani tetap mampu berusaha secara optimal dan dapat menerapkan teknologi rekomendasi usahatani secara penuh. Melalui upaya ini diharapkan tujuan dan sasaran pembangunan pertanian tercapai, di antaranya menjamin ketahanan pangan dan gizi untuk seluruh masyarakat, meningkatkan pendapatan petani secara berkelanjutan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional.





## BOX 2: Mentan SYL Dorong Petani Gunakan KUR sebagai Modal Utama dalam Usaha

### MENTAN SYL DORONG PETANI GUNAKAN KUR SEBAGAI MODAL UTAMA DALAM USAHA

January 26, 2022

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengajak para petani Indonesia untuk menggunakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai permodalan utama dalam menumbuhkan ekonomi di tengah pandemi. Menurut Mentan, penggunaan KUR bisa membuat pelaku usaha menjadi lebih berkembang dan bisa membuka banyak lapangan kerja. “Saya selalu katakan pertanian itu buka lapangan kerja dan dengan adanya KUR, roda perekonomian dasar masyarakat kembali bergerak saat pandemi ini,” ujar Mentan, Minggu, 23 Januari 2022. Disisi lain, Mentan mengatakan penggunaan KUR juga bisa membuat produktivitas dan kesejahteraan petani makin meningkat.

Apalagi pemerintah telah menyiapkan berbagai perlengkapan modern seperti teknologi dan mekanisasi dalam melakukan produksi. “Dengan penggunaan KUR maka akselerasinya pertanian kita jauh lebih kuat dan jauh lebih cepat. Dengan begitu kesejahteraan petani juga akan meningkat,” katanya. Sebagaimana diketahui, realisasi KUR pertanian tahun 2021 mencapai Rp 85,5 triliun atau 122 persen dari target Rp 70 triliun dan melibatkan 2,6 juta debitur. Capaian ini naik lebih tinggi dibandingkan capaian KUR pertanian 2020 yang hanya sebesar Rp 55 triliun.

KUR pertanian 2021 mencakup KUR tanaman pangan Rp 23,0 triliun terutama untuk padi, jagung, ubi kayu, penggilingan. KUR perkebunan Rp 29,7 triliun, KUR peternakan Rp 15,5 triliun, KUR hortikultura Rp 10,8 triliun serta KUR untuk jasa pertanian dan lainnya. Sebelumnya **Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan penghargaan atas capaian penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pertanian kepada Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL)**. Mentan dinilai sukses mengawal penyaluran KUR pertanian dengan jumlah yang sangat besar.

## IV. KUR BERGERAK, PETANI TERGERAK

### Capaian Penyaluran KUR Sektor Pertanian

Dampak KUR terhadap pembangunan pertanian, secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu dampak langsung dan dampak tidak langsung. Dampak langsung terlihat dari penggunaan KUR yang mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan produksi komoditas pertanian. Contohnya, KUR untuk usaha budi daya tanaman, dimana dengan adanya KUR petani dapat mengimplementasikan teknis budi daya sesuai dengan rekomendasi, seperti penggunaan benih bersertifikat dan dosis pemupukan.

Dampak tidak langsung dapat dilihat dari penggunaan KUR yang memberikan dampak ke produksi pertanian, namun melalui usaha lain. Sebagai contoh, KUR penggilingan padi yang digunakan untuk membeli gabah petani. Keberadaan KUR tersebut dapat mengkondisikan harga gabah petani tidak mengalami anjlok pada saat panen raya, karena penggilingan padi (dengan dukungan KUR) dapat membeli gabah petani minimal sesuai harga pembelian pemerintah (HPP). Dengan terjaganya harga gabah di tingkat petani, maka petani masih memperoleh insentif harga untuk tetap menanam padi pada musim tanam berikutnya. Dalam konteks ini, KUR minimal dapat berperan menjaga tingkat produksi komoditas pertanian tidak mengalami penurunan (baca: stabil).

Seperti telah disampaikan sebelumnya, sejak awal SYL berkomitmen untuk memanfaatkan KUR dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian. Dalam berbagai kesempatan SYL senantiasa mengingatkan kepada Ditjen/Badan lingkup Kementan untuk memanfaatkan KUR secara optimal, karena skema KUR semakin mudah dan sangat sesuai dengan kondisi dan kebutuhan petani Indonesia. Atas arahan SYL tersebut, beberapa program dan kegiatan Kementan yang





disinergikan dengan KUR antara lain:

- a. Komando Strategi Penggilingan Padi (Kostraling), yaitu gerakan pemberdayaan dan penguatan usaha pengeringan dan penggilingan padi. Dukungan KUR dalam program ini dapat digunakan untuk pembelian gabah petani dan/atau memperbaiki alat/sarana pengeringan atau penggilingan.
- b. Gerakan Mendorong Produksi, Daya Saing, dan Ramah Lingkungan Hortikultura (Gedor Horti), yaitu program unggulan Ditjen Hortikultura yang bertujuan mendorong peningkatan produksi, ekspor, dan pemanfaatan KUR komoditas hortikultura.



“ Menanam atau membuat green house dengan anggaran pribadi itu awalnya sangat tidak mungkin. Akan tetapi, sejak ada KUR Pertanian, sekarang saya bisa memiliki 3 green house sampai 2022 ini dan alhamdulillah bantuan ini sangat baik dan bagus banget untuk petani milenial dan membantu mengembangkan basic kemampuan petani milenial dalam Bertani.

Terima kasih banyak untuk bapak Menteri pertanian untuk anggaran KUR Pertanian yang telah membantu kami untuk membangun pertanian Indonesia yang lebih maju dan sukses Kembali.

**Bambang, Petani Cabai Paprika Kab. Bandung**

- c. Sapi Kerbau Komoditas Andalan Negeri (Sikomandan) merupakan program unggulan Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan yang merupakan penyempurnaan dari program Sapi Indukan Wajib Bunting (Siwab). Program ini utamanya ditujukan untuk meningkatkan populasi sapi dan kerbau melalui inseminasi buatan. Peran KUR dalam program ini

adalah mendukung peternak untuk secara mandiri (swadaya) melakukan inseminasi buatan

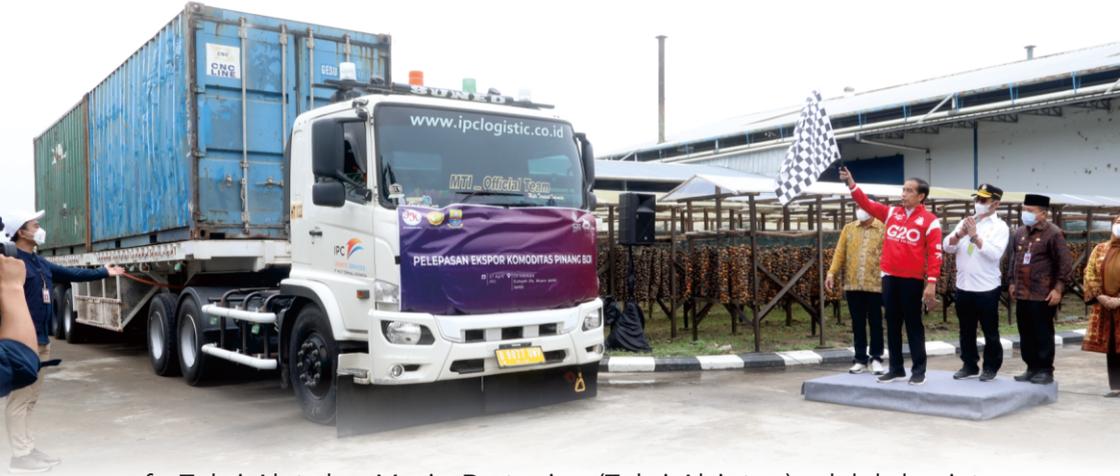
- d. Gerakan Peningkatan Produksi, Nilai Tambah, dan Daya Saing Perkebunan (Grasida) merupakan dukungan terhadap Gerakan Tiga Kali Lipat Ekspor (Gratieks), dimana ada tujuh komoditas prioritas yang akan dikembangkan yaitu kopi, kakao, kelapa, jambu mete, lada, pala, dan vanili. Peran KUR adalah mendorong peningkatan produksi dan kualitas tujuh komoditas tersebut.
- e. Gerakan Tiga Kali Lipat Ekspor Pertanian (Gratieks) merupakan upaya Kementan untuk mendorong ekspor komoditas pertanian semakin meningkat, baik nilai, volume, maupun keragaman komoditasnya. Untuk mendukung gerakan tersebut, KUR diharapkan dapat dimanfaatkan oleh para petani untuk memperbaiki kualitas produk pertaniannya agar dapat memenuhi persyaratan ekspor





“ Saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Menteri Pertanian dan Kementerian Pertanian yang sudah membantu kami, memfasilitasi kami para petani dengan sosialisasi yang begitu gencar untuk mengakses program KUR dengan lebih mudah. ”

Uus Permana, Peternak Sapi Kab. Bandung



- f. Taksi Alat dan Mesin Pertanian (Taksi Alsintan) adalah kegiatan model tata kelola usaha jasa alsintan dengan sistem jasa sewa atau pinjam pakai oleh petani/poktan/ gapoktan/UPJA melalui bantuan pemerintah (APBN) dan skim kredit perbankan (KUR) dengan dukungan pemanfaatan teknologi informasi untuk penguatan usaha/bisnis kelembagaan pengelola alsintan.



Gambar 11. Zonasi Taksi Alsintan Merah Putih



“ Dengan program terobosan dari Bapak Menteri Pertanian yang namanya Program Taksis Alsinan yang dibiayai oleh Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah terbukti ada di Sumatera Selatan dan beberapa tempat yang belum harus kita dorong supaya level mekanisasi pertanian kita bisa ditingkatkan sehingga efisiensi pertanian kita, khususnya padi bisa ditingkatkan.

**Ali Jamil, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian** ”

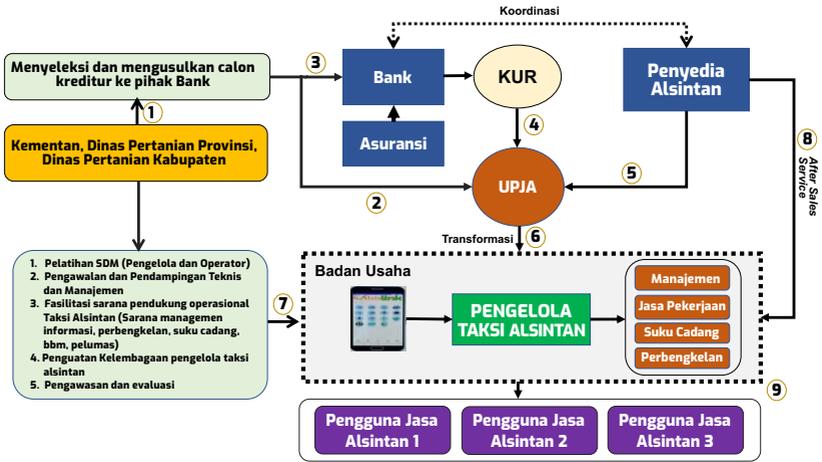
“ Ini adalah salah satu program prioritas dari Kementerian Pertanian dengan sistem pembiayaan yang mudah, murah dan fleksibel bagi petani kita yaitu KUR. Disini adalah inisiasi dari Bapak Menteri kita, Bapak Prof Dr Syahrul Yasin Limpo, MH dan ini adalah program pemerintah dari Bapak Presiden Jokowi agar sistem permodalan bagi petani kita berjalan dengan baik.

**Indah Megawati, Direktur Pembiayaan Pertanian** ”

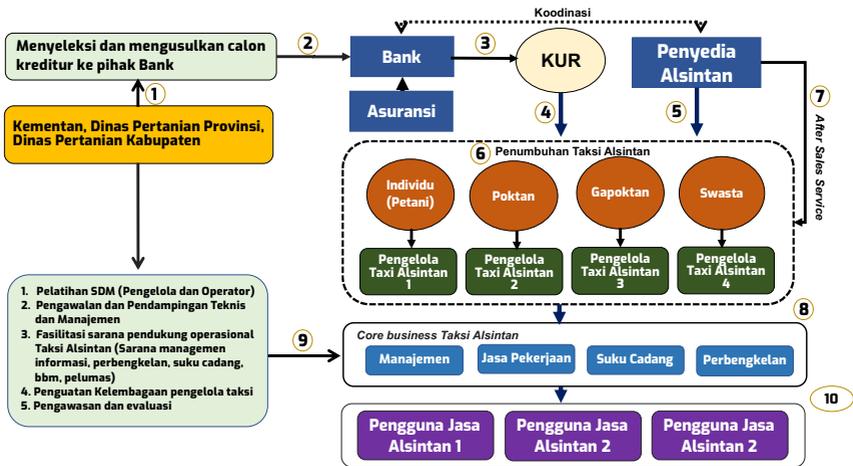


“ Saya atas nama masyarakat Kab. Banyuwasin dan pemerintah Kab. Banyuwasin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Menteri Pertanian RI, Bapak Syahrul Yasin Limpo. semoga Bapak Syahrul Yasin Limpo dapat diberikan kesehatan dan selalu sayang pada masyarakat petani Indonesia, khususnya masyarakat petani Kab. Banyuwasin.

**H. Askolani, Bupati Kab. Banyuwasin,** ”



Gambar 12. Proses Bisnis Taksi Alsintan Melalui Pola Transformasi UPJA



Gambar 13. Proses Bisnis Taksi Alsintan Melalui Pola Individu(petani)/ Poktan/Gapoktan/Swasta



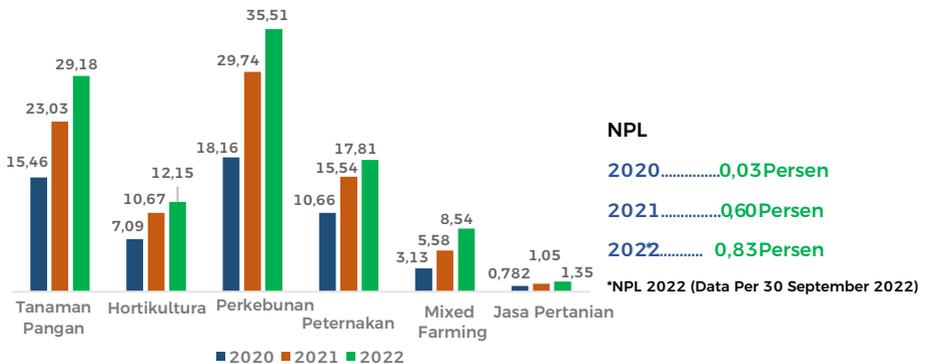
- g. Penumbuhan petani milenial sebagai upaya untuk mengakselerasi regenerasi petani Indonesia yang saat ini didominasi oleh petani berusia 55 tahun ke atas. Peran KUR dalam program ini adalah mendukung permodalan usaha petani milenial, utamanya ke arah teknologi modern.



Dalam perkembangannya, ada berbagai kegiatan baru yang disinergikan dengan KUR, seperti Kampung Hortikultura; 1.000 Desa Sapi; pengembangan sorgum; pengembangan kelapa genjah; dan pengembangan gula nontebu.

Berbagai program/gerakan/kegiatan di atas dalam pelaksanaannya dapat mendorong penyerapan KUR di sektor pertanian. Selama kurun waktu 2020-2022 penyerapan KUR di empat subsektor mengalami peningkatan yang signifikan. Di subsektor tanaman pangan, serapan KUR tahun 2020 sebesar Rp15,46 triliun dan meningkat tajam menjadi Rp23,03 triliun (2021). Hal yang sama terjadi di subsektor hortikultura (dari Rp7,09 triliun menjadi Rp10,67 triliun); subsektor perkebunan (dari Rp18,16 triliun menjadi Rp29,74 triliun); dan subsektor peternakan (dari Rp10,66 triliun menjadi Rp15,54 triliun). Performa serapan KUR di empat subsektor tersebut menjadikan target serapan KUR sektor pertanian tahun 2020 (Rp50 triliun) dan 2021 (Rp70 triliun), terlampaui dengan realisasi serapan masing-masing sebesar Rp55,30 triliun atau 110,62% dari target (2020) dan Rp85,62 triliun atau 122,31% dari target (2021).

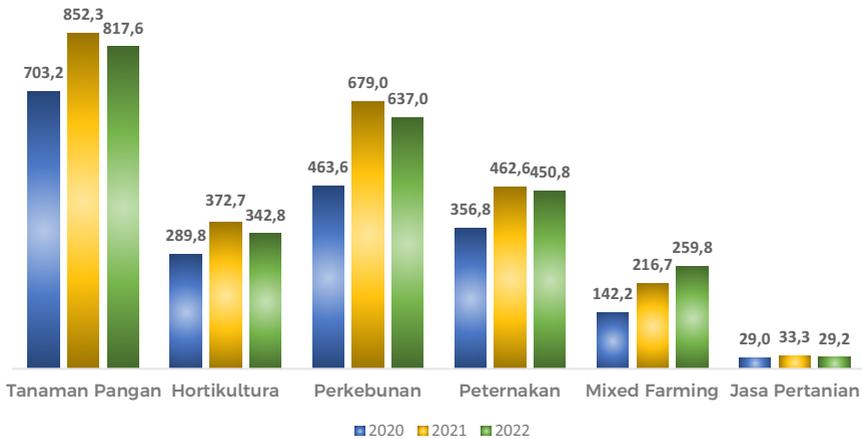
Untuk penyaluran KUR tahun 2022, dari target sektor pertanian sebesar Rp90 triliun, hingga periode 6 Desember 2022 sudah terealisasi sebesar Rp104,58 triliun (116,20%). Capaian realisasi KUR tertinggi adalah subsektor perkebunan sebesar Rp35,51 triliun dari target Rp30,08 triliun (118,08%); diikuti subsektor tanaman pangan sebesar Rp29,18 triliun dari target 26,47 triliun (110,26%); subsektor hortikultura sebesar Rp12,15 triliun dari target Rp12,09 triliun (100,53%); dan subsektor peternakan sebesar Rp17,81 triliun dari target Rp21,36 triliun (83,42%). Jumlah debitur yang sudah terlayani KUR sebanyak 2,54 juta orang dan diharapkan akan bertambah hingga akhir Desember 2022. Selain itu, yang patut membanggakan, jumlah KUR yang tidak bisa dikembalikan (*Non Performing Loan-NPL*) sangat kecil yaitu masing-masing 0,03% pada tahun 2020 dan 0,6% pada tahun 2021.



**Gambar 14. Realisasi dan Tingkat NPL KUR Pertanian, 2020-2022\* (Rp Triliun)**

**Sumber : KemenkeuData Tahun 2022 (Data Per 6 November 2022)**

Perkembangan jumlah debitur KUR di keempat subsektor juga menarik untuk dicermati. Debitur KUR subsektor tanaman pangan pada tahun 2020 mencapai 703,2 ribu orang dan meningkat menjadi 851,3 ribu orang (2021). Peningkatan jumlah debitur juga terjadi pada subsektor hortikultura (dari 289,8 ribu orang menjadi 372,5 ribu orang); subsektor perkebunan (dari 463,6 ribu orang menjadi 678,7 ribu orang); dan subsektor peternakan (dari 356,8 ribu orang menjadi 462,3 ribu orang). Pada tahun 2022, debitur KUR subsektor tanaman pangan sebesar 817,6 ribu orang, subsektor hortikultura sebesar 342,8 ribu orang, subsektor perkebunan sebesar 637 ribu orang dan subsektor peternakan sebesar 450,8 ribu orang. Jumlah debitur sektor pertanian selengkapny dapat dilihat pada Gambar 15.



**Gambar 15. Jumlah Debitur KUR Pertanian Berdasarkan Sub Sektor Tahun 2020-2022 (Ribu Petani)**  
**Sumber : Kemenkeu (Data Per 6 Desember 2022)**

Terkait dengan peningkatan jumlah nilai KUR dan debitur di sektor pertanian, ada dua indikasi keberhasilan penting, yaitu jumlah penerima manfaat semakin meningkat dan beragam jenis usahanya, termasuk petani budidaya; dan adanya debitur yang berhasil “naik kelas” ke tingkat pembiayaan yang lebih tinggi. Indikasi ini sejalan dengan laporan Sekretariat Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM dari penyalur KUR, sejak tahun 2015 hingga 2022 ada sebanyak 14,13 juta debitur atau 39% dari total debitur yang telah mengakses KUR, berhasil naik kelas ke tingkat pembiayaan yang lebih tinggi. Disamping itu, juga terjadi peningkatan jumlah debitur baru dengan capaian terbesar pada skema KUR Mikro yang melampaui 1,5 juta debitur setiap tahunnya sejak 2017 dan pada tahun 2021 meningkat signifikan mencapai 2,8 juta atau 68,72% dari total debitur baru pada seluruh jenis skema KUR tahun 2021.

### Kontribusi KUR terhadap Kinerja Sektor Pertanian

Program unggulan yang ada di masing-masing Ditjen/Badan lingkup Kementan, utamanya diarahkan untuk mendorong peningkatan komoditas strategis. Artinya, apabila dalam penyerapan KUR di masing-masing subsektor pertanian dapat diuraikan berdasarkan kelompok pengguna, maka kontribusi KUR terhadap

kinerja sektor pertanian dapat diukur dengan lebih baik. Namun dengan keterbatasan informasi kelompok pengguna KUR di masing-masing subsektor, maka kontribusi KUR terhadap kinerja sektor pertanian diduga dari perannya secara langsung dan tidak langsung.

Kontribusi KUR secara langsung terjadi pada skim pembiayaan untuk usaha budidaya pertanian. Hasil kajian menunjukkan penggunaan KUR budidaya umumnya digunakan untuk memperluas lahan garapan, pembelian sarana produksi dan biaya pengolahan, sementara untuk subsektor peternakan digunakan pembelian ternak. Berdasarkan penggunaan KUR tersebut terlihat bahwa apabila KUR budidaya semakin banyak diakses petani, maka sangat berpotensi mendorong peningkatan produksi pertanian, baik melalui peningkatan luas panen maupun produktivitas. Peningkatan luas panen dapat dipicu oleh penggunaan KUR untuk memperluas lahan garapan, sementara peningkatan produktivitas terjadi melalui penggunaan sarana produksi, utamanya benih, pupuk, dan obat-obatan pengendali OPT, sesuai rekomendasi.

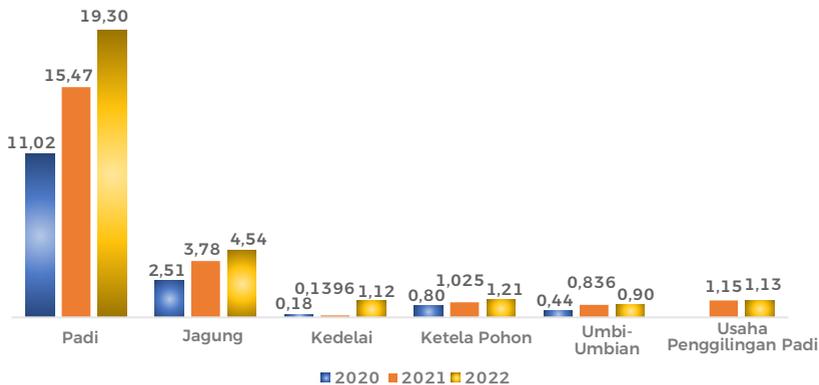
Kontribusi KUR terhadap peningkatan produktivitas didukung oleh data nasional penyaluran KUR bahwa untuk sektor pertanian, lebih dari 90% dimanfaatkan petani untuk membiayai kegiatan *on-farm*, dan sisanya diakses usaha *off farm* (salah satunya usaha penggilingan padi) dan kegiatan jasa terkait sektor pertanian. Hasil kajian optimalisasi KUR oleh PSEKP (2020) mengkonfirmasi data nasional tersebut bahwa 98,2% petani yang memperoleh kredit KUR memanfaatkan untuk membiayai kegiatan usahatani *on-farm* dan memiliki dampak pada peningkatan produktivitas usahatannya.



Kontribusi KUR secara tidak langsung dapat mengambil contoh program Kostraling. Program tersebut utamanya adalah untuk mendukung pembiayaan RMU dalam pembelian gabah petani. Semakin banyak RMU yang mempunyai daya serap gabah petani yang tinggi, diharapkan akan menopang harga gabah pada saat panen raya, sehingga tidak jatuh di bawah HPP. Stabilitas harga gabah dapat menjaga insentif usahatani padi di tingkat petani, sehingga petani tetap tertarik untuk menanam padi pada musim berikutnya. Dengan demikian, perpaduan penggunaan KUR budidaya (dalam hal ini padi) dengan KUR Kostraling dapat meningkatkan pendapatan petani melalui peningkatan produktivitas dan stabilitas harga gabah di tingkat petani. Apabila kondisi ini dapat berkelanjutan, maka harapan agar petani dapat “naik kelas” dan lebih sejahtera adalah sebuah keniscayaan.

Walaupun nilai realisasi KUR sektor pertanian masih relatif kecil dibandingkan dengan kebutuhan pembiayaan secara keseluruhan di sektor pertanian, namun dorongan secara masif selama tiga tahun terakhir diyakini telah memberikan kontribusi terhadap capaian produksi dan stabilitas harga komoditas pertanian, utamanya selama dan sesudah pandemi Covid-19. Berikut pencermatan terhadap beberapa komoditas yang mendapat fasilitas KUR selama kurun waktu 2020-2022 berdasarkan subsektor:

- a. Di subsektor tanaman pangan, ada empat komoditas yang secara konsisten selama kurun waktu 2020-2022 menyerap KUR relatif tinggi, yaitu padi, jagung, ketela pohon, dan umbi-umbian lainnya. Selama kurun waktu tersebut, realisasi KUR untuk padi melonjak tajam dari Rp11,02 triliun (2020) menjadi Rp19,3 triliun (2022). Hal yang sama juga terjadi untuk realisasi KUR jagung yang meningkat dari Rp2,51 triliun menjadi Rp4,54 triliun; ketela pohon dari 798,9 milyar menjadi Rp1,21 triliun; dan umbi-umbian lainnya dari Rp443,6 milyar menjadi Rp896,5 milyar. Perkembangan yang menarik terjadi pada KUR kedelai, yang meningkat tajam dari Rp182,2 milyar (2020) menjadi Rp1,12 triliun (2022). Sementara itu, serapan KUR untuk usaha penggilingan padi mencapai Rp1,13 triliun (2022), sedikit menurun dibanding 2021 yang sebesar Rp1,15 triliun. Fakta ini menunjukkan KUR telah berkontribusi terhadap pencapaian produksi padi, jagung, ketela pohon, dan porang selama tiga tahun terakhir.



**Gambar 16. Realisasi KUR Pertanian Subsektor Tanaman Pangan Tahun 2020-2022 (Rp Triliun)**

Sumber : Kemenkeu (Data Tahun 2022 Per 30 November 2022)

Keterangan : KUR Sektor Usaha Penggilingan tidak tersedia Tahun 2020

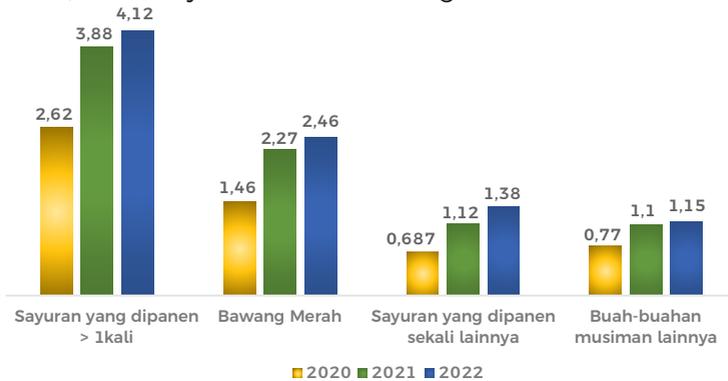


“ Selama bergabung dengan KUR BNI, saya merasakan begitu banyak dibantunya oleh KUR BNI dan sekarang saya tidak merasakan kendala untuk modal tani. Hasil tani juga saya langsung dijual ke rekan BNI secara normal dan harga standar, tidak dipersulit soal harga dan transportasi langsung dijemput ke tempat saya. Alhamdulillah segala bantuan dari KUR Tani sudah dinikmati bukan saya sendiri, tapi keseluruhan kelompok saya sudah merasakan bagaimana enaknya bergabung dengan KUR Tani. Saya begitu benar-benar rasa terima kasih juga kepada Bapak Menteri (SYL) yang memberi fasilitasi KUR tani dari BNI ini.

**Ibu Fatim, Petani Padi/Ketua Kelompok Mekar Sari, Ds. Mekarsari, Kec. Sukawening, Kab. Garut**

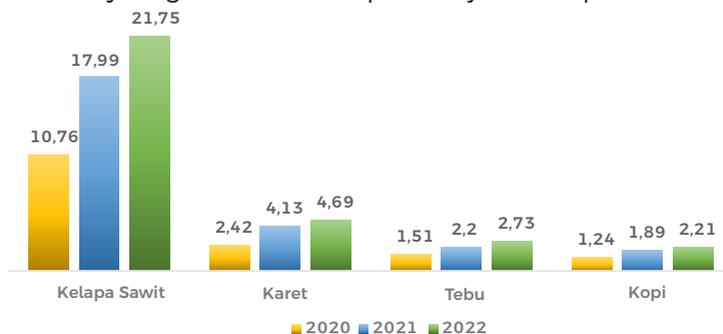
- b. Di subsektor hortikultura, kelompok komoditas konsisten menyerap KUR relatif tinggi adalah sayuran yang panen lebih dari satu kali (utamanya cabai), sayuran yang dipanen satu kali (bawang merah), sayuran yang dipanen satu kali lainnya, dan buah-buahan musiman lainnya. Selama kurun waktu 2020-2022, serapan KUR untuk kelompok sayuran yang dipanen lebih dari satu kali meningkat tajam dari Rp2,62 triliun (2020) menjadi Rp4,12 triliun (2022). Kondisi yang sama juga terjadi pada KUR untuk bawang merah yang meningkat dari Rp1,46 triliun menjadi Rp2,46 triliun; kelompok sayuran yang dipanen satu kali lainnya meningkat dari Rp687,5 milyar menjadi Rp1,38 triliun; dan kelompok buah-buahan musiman lainnya meningkat dari Rp770,3 milyar menjadi Rp1,15 triliun. Fakta ini

menunjukkan KUR telah berkontribusi mendorong peningkatan produksi dan upaya menjaga stabilitas harga komoditas pemicu inflasi, khususnya cabai dan bawang merah.



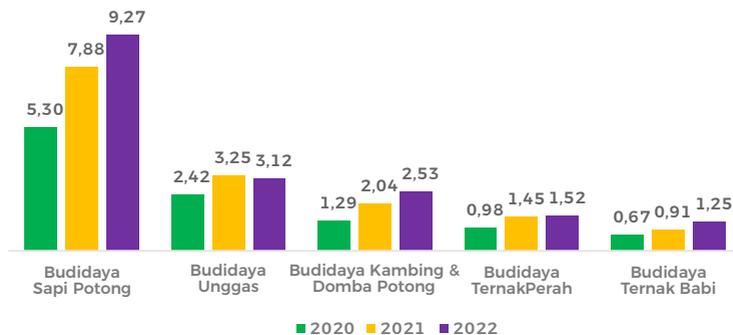
**Gambar 17. Realisasi KUR Pertanian Subsektor Hortikultura Tahun 2020-2022 (Rp Triliun)**  
 Sumber : Kemenkeu (Data Tahun 2022 Per 30 November 2022)

- c. Di subsektor perkebunan, empat komoditas yang konsisten menyerap KUR tertinggi adalah kelapa sawit, karet, tebu, dan kopi. Selama kurun waktu 2020-2022, serapan KUR untuk perkebunan kelapa sawit meningkat lebih dari dua kali lipat, dari Rp10,76 triliun (2020) menjadi Rp21,75 triliun (2022); sementara KUR untuk perkebunan karet juga meningkat tajam dari Rp2,42 triliun menjadi Rp4,69 triliun; perkebunan tebu meningkat dari Rp1,51 triliun menjadi Rp2,73 triliun; dan perkebunan kopi meningkat dari Rp1,24 triliun menjadi Rp2,21 triliun. Penyerapan KUR yang tinggi di perkebunan kelapa sawit, umumnya digunakan untuk peremajaan kelapa sawit.



**Gambar 18. Realisasi KUR Pertanian Subsektor Perkebunan Tahun 2020-2022 (Rp Triliun)**  
 Sumber : Kemenkeu (Data Tahun 2022 Per 30 November 2022)

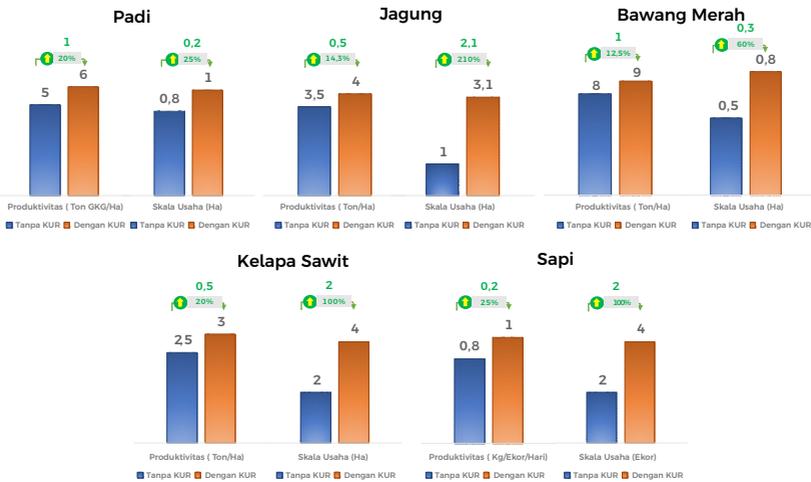
d. Untuk subsektor peternakan, ada lima usaha budidaya ternak yang intensif memanfaatkan KUR, yaitu budidaya sapi potong, budidaya unggas, budidaya kambing dan domba potong, budidaya ternak perah, dan budidaya babi. Selama kurun waktu 2020-2022, serapan KUR untuk budidaya sapi potong konsisten meningkat dari Rp5,30 triliun (2020) menjadi Rp9,27 triliun (2022). Kondisi yang sama juga terjadi untuk serapan KUR budidaya unggas yang meningkat dari Rp2,42 triliun menjadi Rp3,12 triliun; budidaya kambing dan domba potong meningkat dari Rp1,29 triliun menjadi Rp2,53 triliun; budidaya ternak perah meningkat dari Rp975 milyar menjadi Rp1,52 triliun; dan budidaya ternak babi meningkat dari Rp674,9 milyar menjadi Rp1,25 triliun. Tingginya serapan KUR untuk budidaya sapi potong dan kambing-domba potong sangat mendukung upaya pemulihan serangan penyakit mulut dan kuku (PMK) yang terjadi satu tahun terakhir di Indonesia.



**Gambar 19. Realisasi KUR Pertanian Subsektor Peternakan Tahun 2020-2022 (Rp Triliun)**  
**Sumber : Kemenkeu (Data Tahun 2022 Per 30 November 2022)**

## KUR Mendongkrak Kinerja Usaha Pertanian

Dari hasil pengamatan dan kajian Ditjen PSP dampak KUR terhadap peningkatan produktivitas dan skala usaha, khususnya komoditas padi, jagung, sapi, bawang merah dan sawit. Hasilnya pun sangat menggembirakan karena pengakses KUR di komoditas tersebut, terjadi peningkatan produktivitas dan skala usaha.



**Gambar 20. Dampak KUR terhadap peningkatan produktivitas dan skala usaha pertanian**  
**Sumber: Hasil kajian Ditjen PSP (2022)**

Contohnya, pada tanaman padi, tanpa KUR produktivitas hanya sebesar 5 ton GKG/ha. Setelah menggunakan KUR, produktivitas meningkat menjadi 6 ton GKG/ha atau naik sebesar 20 persen. Sedangkan dalam skala usaha, meningkat sebesar 25 persen. Untuk petani jagung, produktivitas tanpa KUR hanya sebesar 3,5 ton/ha. Setelah menggunakan KUR, meningkat menjadi 4 ton/ha atau naik 14,3 persen. Skala usaha meningkat sebesar 210 persen.

Untuk usaha bawang merah, produktivitas tanpa KUR sebesar 8 ton/ha. Setelah menggunakan KUR, produktivitas meningkat menjadi 9 ton/ha atau naik 12,5 persen. Skala usahanya meningkat sebesar 60 persen. Selain itu, pekebun sawit juga banyak memanfaatkan KUR. Terlihat dari peningkatan produktivitas dengan adanya KUR dari 2,5 ton/ha menjadi 3 ton/ha atau meningkat 20 persen dan dalam skala usaha meningkat 100 persen.

Dalam pembiayaan usaha peternakan sapi potong, produktivitas tanpa KUR hanya sebesar 0,8 kg/ekor/hari. Setelah menggunakan KUR, produktivitas naik menjadi 1 kg/ekor/hari atau meningkat 25 persen. Skala usaha meningkat sebesar 100 persen. Pengaruh pembiayaan KUR mungkin tidak secara langsung meningkatkan produktivitas, namun harus dipahami bahwa dengan tersedianya dana di tangan petani membuat pemenuhan sarana produksi dalam berusahatani akan dapat dipenuhi dengan standar dan kualitas yang baik, terlebih adanya peran penyuluh pertanian yang senantiasa mendampingi

petani/peternak di lapang. Dalam hal peningkatan skala usaha, ternyata ketersediaan dana yang berasal dari KUR mampu memperluas lahan garapan dan meningkatkan jumlah ternak peliharaan. Hal ini jelas memperlihatkan meningkatnya kemampuan keuangan petani untuk menyewa lahan, memperbesar sistem bagi hasil ternak, dan kegiatan lain yang mendukung peningkatan skala usaha ini. Dengan adanya peningkatan produktivitas dan skala usaha, ketersediaan dana KUR menjadi sangat relevan dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan pertanian nasional.

### Tantangan Implementasi KUR Sektor Pertanian

Strategi dan kebijakan akselerasi pemanfaatan KUR di sektor pertanian selama kurun waktu 2020-2022 menunjukkan kinerja yang membanggakan. Hal ini setidaknya diindikasikan dari realisasi KUR yang melampaui target selama tiga tahun berturut-turut. Namun keberhasilan penyerapan KUR sektor pertanian dalam implementasinya masih menjumpai beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan KUR dalam mendukung pengembangan usaha pertanian. Tantangan implementasi KUR dapat bersumber dari pihak penyalur maupun pihak debitur KUR. Berikut beberapa tantangan implementasi KUR yang perlu diatasi ke depannya:

- a. Dari pihak penyalur KUR, beberapa tantangan yang masih terjadi di lapangan, antara lain:
  - i. Belum semua bank penyalur KUR menyusun petunjuk teknis penyaluran KUR, sehingga implementasi penyaluran kredit masih ada perbedaan antar bank penyalur dan antar wilayah pada bank penyalur yang sama.
  - ii. Sebagian bank penyalur KUR masih menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit secara ketat, sehingga masih dijumpai adanya pihak bank penyalur KUR yang mensyaratkan agunan tambahan untuk pinjaman di bawah Rp100 juta.
  - iii. Proses pengecekan data debitur melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) membutuhkan waktu yang relatif lama (1-3 bulan), sehingga seringkali menyebabkan pencairan kredit tidak sesuai dengan kebutuhan petani (misalnya masa tanam telah lewat).



- b. Dari pihak calon debitur KUR, beberapa tantangan yang masih terjadi di lapangan, antara lain:
  - i. Bagi sebagian petani yang baru pertama kali mengajukan kredit melalui lembaga formal, pemenuhan beberapa persyaratan (walaupun relatif ringan) masih dipahami merepotkan; sehingga mengurangi antusiasme untuk mengajukan KUR;
  - ii. Tunggakan dari kredit sejenis (umumnya terkait kredit macet Kredit Usaha Tani-KUT), seringkali menyebabkan petani tidak lolos pengecekan SLIK;
  - iii. Sebagian petani masih ada yang tidak/belum mempunyai dokumen resmi dan legal terkait dengan kepemilikan lahan dan rumah serta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), sehingga masih menjadi salah satu penghambat petani untuk mengakses KUR.
- c. Terkait dengan tantangan di atas, baik dari pihak penyalur maupun calon debitur KUR, maka solusi yang diupayakan oleh Kementan, antara lain:
  - i. Koordinasi yang intensif dengan pihak bank penyalur KUR untuk menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian No 1 tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, yang belum diimplementasikan oleh bank penyalur KUR, seperti penyusunan petunjuk teknis penyaluran KUR (pasal 47) dan

tidak diperlukannya pengenaan agunan tambahan untuk plafon kredit maksimal Rp100 juta.

- ii. Berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mempercepat proses pengecekan data calon debitur KUR melalui SLIK, sehingga waktu pencairan KUR dapat lebih cepat dan sesuai dengan waktu yang dibutuhkan petani.
- iii. Bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk secara intensif melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada petani yang berminat memanfaatkan KUR. Pendampingan juga dilakukan dalam proses pengurusan dokumen yang sering diminta oleh pihak bank penyalur, seperti sertifikat lahan dan NPWP.



“*Perlu dilakukan penyaluran KUR pertanian berbasis kluster atau ekosistem. Penyaluran KUR pertanian berbasis kluster akan meningkatkan kepercayaan bank untuk menyalurkan kredit kepada para petani.*”

**Wimboh Santoso, Ketua Dewan  
Komisioner Otoritas Jasa Keuangan**



### **Petani di Sumut Rasakan Manfaat KUR Sektor Pertanian**

Rabu, 9 Juni 2021

Medan (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) berkomitmen untuk terus mendukung petani Indonesia dalam meningkatkan produktivitas tani. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui program pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pertanian.

**Program KUR Pertanian sudah mulai dirasakan manfaatnya oleh para petani**, seperti yang dirasakan oleh para petani di Desa Pinagar, Provinsi Sumatera Utara.

Ada tiga warga yang mengajukan dan mendapatkan manfaat KUR Tani di desa tersebut. Salah satunya seorang debitur KUR Tani di Desa Pinagar, Syaiful Siregar, yang sudah dua kali menggunakan KUR Tani untuk usahanya.

"Saya ambil yang Rp10 juta dengan masa pembayaran 2 tahun, jadi saya bayar sekitar Rp400 ribu setiap bulannya, tahun ini pun saya ikut lagi," kata Syaiful.

Ia memilih kembali ikut program KUR Tani karena merasa sangat terbantu untuk modal beternak. Setelah sebelumnya untuk bertani kopi, kini ia mengajukan KUR untuk modal beternak kambing.

"Ya benar, sangat membantu, saya bisa mengembangkan usaha ternak saya dengan dana dari KUR tersebut. Bunganya pun kecil, sehingga tidak terlalu berat bayar tiap bulan," katanya.

Sementara warga lain yang menggunakan KUR Tani adalah Juliani yang mendapatkan pinjaman tanpa agunan. "Kalau saya hanya Rp3 juta untuk pupuk padi, jadi tidak pakai agunan," katanya.

Ia juga bersyukur bisa memperoleh pinjaman KUR saat ia tidak memiliki uang untuk membeli pupuk untuk sawahnya. Selain itu, bunga KUR yang kecil juga membuat cicilannya tidak terlalu berat baginya.

Selain program KUR dari Kementan yang dirasakan manfaatnya oleh petani tersebut, terdapat program lain seperti Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) yang diikuti oleh mereka karena menurut mereka telah terbukti sangat membantu sektor pertanian.

*Pewarta: Evalisa Siregar*

*Editor: Riza Mulyadi*

#### **BOX 4: Petani Apresiasi Peningkatan Alokasi Kredit Usaha Rakyat**

### **Petani Apresiasi Peningkatan Alokasi Kredit Usaha Rakyat**

**24 Maret 2021, 19:56:21 WIB**

**JawaPos.com**—Peningkatan alokasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) di sektor pertanian diapresiasi petani. Hal itu diakui Mas'udi, salah satu perwakilan dari Poktan Rowo Makmur, Desa Kedungharjo, Kecamatan Widang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Menurut dia, **program KUR sangat membantu petani. Terutama dalam mendapatkan modal ketika akan menggarap lahan.**

"KUR bisa meringankan beban petani. Keuntungan petani dalam KUR ini mendapatkan pinjaman dengan syarat yang mudah dan bunga yang diberikan ringan. Dipermudah lagi syarat-syaratnya, kalau bisa dalam pinjaman KUR tanpa ada jaminan, seperti sertifikat tanah, SPT pajak bumi dan bangunan," tutur Mas'udi pada Rabu (24/3).

Mas'udi juga berharap agar ada sosialisasi yang masif. Pemerintah juga melakukan jemput bola ke masyarakat untuk menawarkan dan mempercepat penyerapan program tersebut kepada petani.

Tidak hanya peningkatan nominal, perubahan sistem juga dinilai meringankan beban petani. Salah satunya, sistem permodalan. Hal itu diakui Ramadhan Arif Yuwono, perwakilan dari Poktan Tani Makmur, Dusun Plalangan, Desa Plosowahyu, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan. Dia merasa program KUR di sektor pertanian meringankan permodalan saat petani dalam masa tabur benih.

"Keuntungannya untuk mencari modal itu biar tidak susah, pembayarannya setelah masa panen dan manfaatnya juga banyak bagi para petani," terang Arif.



“

Langkah-langkah pertama saya meminjam KUR tani mengumpulkan anggota, persyaratan (KTP, KK, Formulir dan luas lahan). Tidak ada kendala dari pihak BNI, itu mempermudah pinjaman KUR tani, tidak dipersulit, proses mudah dan cepat.

Manfaat yang dirasakan yaitu paling utama pemberian modal dulu susah kalau permodalan, sekarang mudah untuk pinjam modal buat beli pupuk, bibit itu bisa banyak manfaatnya. Selama pandemi saya mendapatkan pengurangan bunga dari pinjaman KUR Tani, yang semula 35.000 jadi 25.000.

Terima kasih Pak Menteri (SYL) dan KUR Tani.”

Ibu Irawati, Petani Jagung/Ketua Kelompok Mukti Tani, Ds. Darder, Kec. Banyu, Kab. Garut



## V. PEMBELAJARAN MANAJEMEN SYL DALAM PEMBIAYAAN PERTANIAN

Salah satu kendala utama bagi petani, khususnya petani skala kecil dalam memperluas usaha dan menerapkan teknologi sesuai rekomendasi adalah keterbatasan modal usaha. Keterbatasan tersebut dapat berasal dari rendahnya kemampuan keuangan dirinya sendiri ataupun terbatasnya akses terhadap sumber pembiayaan dari lembaga perbankan karena ada persyaratan yang tidak selalu mudah dipenuhi. Mentan SYL memahami benar hal ini seiring dengan panjangnya pengalaman sebagai kepala daerah yang cukup lama pada berbagai tingkatan pemerintahan. Sebagai Menteri Pertanian, SYL menyadari sepenuhnya bahwa tulang punggung untuk mencapai keberhasilan pembangunan pertanian adalah Bergeraknya secara produktif usaha pertanian yang pelakunya didominasi oleh skala kecil.

Merespons terhadap permasalahan ini, SYL melihat ada peluang besar sebagai sumber pembiayaan bagi petani, yaitu skim pembiayaan KUR. Apabila skim pembiayaan ini dapat dimanfaatkan secara optimum, maka permasalahan tersebut dapat teratasi dengan baik. KUR adalah salah satu program pemerintah dalam meningkatkan akses pembiayaan bagi UMKM setiap bidang usaha, disalurkan melalui lembaga keuangan dengan pola penjaminan. Program KUR dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan permodalan usaha dalam rangka pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan sektor riil dan pemberdayaan UMKM. Fasilitas KUR di sektor pertanian dibutuhkan bagi pengembangan setiap agribisnis komoditas untuk pembelian alsintan, sarana produksi pupuk, dan pembiayaan kegiatan usaha seperti olah tanah dan pemeliharaan tanaman dan ternak. KUR juga diperlukan agar petani mampu menerapkan rekomendasi teknologi sejalan dengan tema pertanian maju, mandiri dan modern.

Seperti telah diuraikan sebelumnya, berbagai tantangan dalam optimalisasi pemanfaatan KUR sektor pertanian, telah direspon oleh Kementan melalui berbagai strategi dan kebijakan yang melibatkan banyak pihak. Dengan demikian, dalam implementasinya tentu terdapat aspek keberhasilan dan kekurangan yang dapat dijadikan pembelajaran untuk mempertahankan capaian KUR selama tiga tahun terakhir. Untuk itu, dalam bagian ini akan diuraikan berbagai pembelajaran dari manajemen SYL dalam mengoptimalkan penyaluran KUR sektor pertanian, baik dari sisi keberhasilan maupun kekurangan dalam pelaksanaannya.

## Keberhasilan Manajemen SYL

Meskipun sangat dibutuhkan petani skala kecil, namun KUR tidak selalu mudah diakses karena berbagai alasan. Kendala pemanfaatan KUR di sektor pertanian karena masing-masing usaha pertanian memiliki kekhasan sendiri, dipengaruhi oleh jenis komoditas, agro-ekosistem, skala usaha, siklus produksi dan pola panen, serta kemampuan petani menerapkan teknologi baru. Untuk sektor pertanian, skim KUR harus dirancang spesifik sesuai dengan sifat dan pola usaha agribisnis komoditas, sejalan dengan ungkapan: *“there is no one-size-fits all approach to agriculture systems development”*. Ada beberapa pembelajaran positif dari manajemen SYL dalam mengoptimalkan penyaluran KUR sektor pertanian, yaitu:

- a. Filosofi “kesempatan tidak datang dua kali” dipegang benar oleh manajemen SYL, sehingga peluang kebijakan KUR yang semakin dipermudah dan sesuai dengan karakteristik petani Indonesia, dimanfaatkan secara optimal. Langkah ini dicerminkan dari penetapan target KUR untuk masing-masing Ditjen/Badan lingkup Kementan untuk direalisasikan di lapangan.
- b. Cermat dalam melakukan pemetaan tantangan dan peluang, sehingga diperoleh jalan keluar optimal meskipun dalam situasi keterbatasan. Penyaluran KUR sektor pertanian pada saat terjadinya pandemi Covid-19 (2020) diatasi melalui sosialisasi secara virtual secara intensif, sehingga dapat membantu petani dan usaha pertanian untuk tetap menjalankan usahanya.
- c. Pemanfaatan *big data*, teknologi digital dan sistem informasi untuk proses perencanaan, dan pengendalian dan evaluasi serta untuk melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada petani di seluruh Indonesia. Melalui tatap muka secara virtual, kendala

pembatasan mobilitas dan aktivitas masyarakat selama pandemi dapat diatasi, sehingga informasi teknologi tetap dapat tersampaikan kepada petani.



- d. Hasil monitoring dan evaluasi dimanfaatkan secara optimal yang diwujudkan dengan melakukan penyesuaian/revisi terhadap kebijakan dan regulasi penyaluran KUR sektor pertanian. Upaya ini efektif untuk mendorong realisasi penyerapan KUR di lapangan.
- e. Koordinasi yang intensif dengan kementerian/lembaga terkait, seperti Kemenko Perekonomian, Himbara, bank penyalur KUR, pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) untuk memperbaiki skema KUR serta sosialisasi dan pendampingan pemanfaatan KUR oleh petani.
- f. Pelibatan pihak swasta sebagai *off taker* atau *off taker* sekaligus avalis memiliki dua manfaat sekaligus, meningkatkan minat petani untuk menjadi debitur KUR dan meningkatkan kepercayaan Bank Penyalur KUR terhadap kemampuan petani melakukan pelunasan kreditnya,

## Optimalisasi Manajemen SYL

Selain keberhasilan, manajemen SYL juga mempunyai “pekerjaan rumah” terkait dengan strategi penyaluran KUR sektor pertanian yang masih perlu dioptimalkan pelaksanaannya di lapangan. Artinya, upaya peningkatan penyerapan KUR sektor pertanian masih dapat lebih ditingkatkan melalui perbaikan program dan kegiatan yang masih belum berjalan optimal di lapangan. Beberapa “pekerjaan rumah” dari manajemen SYL yang masih dapat dioptimalkan, antara lain:

- a. Prinsip “kehati-hatian” yang masih diterapkan secara kaku oleh bank penyalur KUR, menjadikan implementasi penyaluran KUR masih banyak dikeluhkan oleh petani karena tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah (baca: Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian), utamanya terkait dengan agunan.
- b. Sebagai bagian dari upaya meningkatkan penyaluran KUR sektor pertanian, perlu dipertimbangkan untuk memperluas sosialisasi dan pendampingan KUR Syariah, karena tidak sedikit petani dan petugas lapangan yang lebih nyaman menggunakan skema pinjaman syariah.
- c. Meningkatkan peran pemerintah daerah untuk melakukan sosialisasi dan pendampingan pemanfaatan KUR pertanian. Hal ini perlu mendapat perhatian karena rentang kendali penyaluran KUR sangat luas, sehingga sangat tidak optimal apabila hanya mengandalkan sumberdaya Kementan dan bank penyalur KUR.



- d. Pendampingan dan pengawalan penyaluran KUR oleh penyuluh pertanian masih perlu ditingkatkan lagi. Keberadaan Peraturan Presiden No. 35 Tahun 2022 tentang Penguatan Fungsi Penyuluhan Pertanian harus dimanfaatkan secara optimal.
- e. Strategi pengembangan kelembagaan korporasi petani untuk usaha pertanian harus diwujudkan secara nyata dan luas. Pendekatan ini merupakan salah satu solusi untuk mengatasi tantangan yang berkaitan dengan skala penguasaan lahan petani yang umumnya relatif kecil (gurem); sehingga bank penyalur KUR lebih yakin untuk memberikan kredit ke petani.

### Menjaga Keberlanjutan KUR Pertanian

Skim KUR pembiayaan sektor pertanian telah terbukti memberikan kontribusi terhadap kinerja peningkatan produksi komoditas strategis. Untuk itu, skim KUR pembiayaan sektor pertanian perlu dipertahankan keberlanjutannya, dan tentu perlu didukung dengan berbagai kebijakan pendukung yang relevan, seperti diuraikan berikut ini:

**Pertama**, memerhatikan bahwa pemanfaatan dana KUR lebih cenderung digunakan untuk pembiayaan input usahatani (pupuk, benih) dan pengolahan lahan (upah tenaga kerja), maka penguatan ketersediaan dana tepat waktu, tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat kualitas menjadi sangat relevan untuk memperlancar perluasan usaha dan mendukung peningkatan produktivitas. Dalam kaitan ini, kehadiran *offtaker* dibutuhkan untuk mengambil peran sebagai pengelola dana petani dan penyedia semua input usahatani yang dibutuhkan, bahkan dapat bertindak sebagai pembeli hasil usahatani petani. Para *offtaker* yang diharapkan mengambil peran tersebut merupakan entitas bisnis secara resmi sebagai perusahaan, koperasi, atau lembaga keuangan yang berbadan hukum. Hal ini diperlukan agar kredibilitas para *offtaker* ini dapat dijamin dan bahkan pemerintah atau Pemda dapat turut mengawasi kinerjanya.



“*Jadi yang selama ini itu, petani dibiayai oleh para bandar, nah dengan adanya KUR Tani ini, para petani mendapatkan modal kerja dari BNI kemudian hasilnya mereka tidak wajib menjual ke bandar tapi bisa menjual ke PT Mitra Desa Bersama Intan.*

*Jadi kita sebagai oftaker harganya juga sesuai harga pasar. Jadi memang tujuan kami untuk menyejahterakan petani. Selain sebagai oftaker, kami juga membantu petani untuk pengadaan benih dan juga mediator antara petani dan BNI dan KUR Tani.*

”

Dani Suherian, Direktur PT Mitra Desa Bersama Intan/  
Offtaker Petani Padi dan Jagung

**Kedua**, untuk menanggung risiko kegagalan panen akibat bencana alam, upaya perlindungan usaha pertanian melalui asuransi pertanian sangat diperlukan. Memfasilitasi petani ikut serta dalam skema asuransi usaha pertanian dapat semakin memperkuat petani untuk berusaha secara optimal, dan juga dapat menambah nilai positif atau kepercayaan bagi Bank Penyalur KUR kepada debiturnya.



**Ketiga**, dengan fleksibilitas skim KUR di sektor pertanian, Kementan dapat mengupayakan dukungan KUR bagi pembiayaan program khusus. seperti program taksi alsintan dan modernisasi penggilingan padi/RMU (mikro, kecil, menengah). Selain itu, skim KUR diharapkan dapat mengantisipasi kebutuhan pendanaan untuk panen raya, melalui kegiatan penyerapan gabah oleh Kostraling dan peningkatan kapasitas RMU, dan kegiatan ekonomi di hilir serta dukungan peningkatan ekspor hasil pertanian, seperti: gula aren, sago, porang, dan sarang burung walet.



“ Alhamdulillah, Pertama, saya ucapkan terima kasih pada Pak Mentan (SYL) dengan adanya pinjaman modal dari KUR BRI saya bisa membantu petani/pengrajin gula aren dalam pemasaran dan penambah penghasilan penambahan keluarga dan dapat menyekolahkan anak sampai ke perguruan tinggi, dan alhamdulillah istri saya pribadi bisa melaksanakan umroh. ”

**Bapak Sunaryai, Petani Gula Aren/  
Ketua Gapoktan Mulya Karya, Ds. Cibaliung,  
Kec. Cibaliung, Kab. Pandeglang, Banten**

Kementerian Pertanian tidak dapat bekerja sendiri menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi untuk mewujudkan tujuan pembangunan pertanian berkelanjutan, termasuk pemanfaatan KUR di sektor pertanian. Upaya mendorong peningkatan kinerja usaha pertanian harus berjalan sinergis dan koordinatif dengan program terkait yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga terkait, serta pemda, swasta/pelaku usaha pertanian, akademisi, dan masyarakat petani secara keseluruhan. Kerja sama kemitraan antar pemangku kepentingan pembangunan pertanian tersebut mutlak diperlukan untuk mewujudkan pertanian yang maju, mandiri, dan modern.”



“ Terima kasih kepada Bapak Menteri (SYL) yang telah membantu kredit KUR untuk pembiayaan pembelian alat Rotavator ini supaya petani menjadi mudah, olah tanah menjadi hemat dan efisien dan hasil memuaskan. Terima kasih Pak Menteri (SYL) atas bantuannya melalui taksi alsintan ini membantu banyak pada petani. ”

**Sugiyarto, Petani Kelompok Tani Rejomulyo,  
Ds. Kedungwaru Kidul Kabupaten Demak, Jateng**

## Box 5

# Dukung Pertanian ke Arah Maju, Mentan Minta Petani Manfaatkan Kredit Usaha Rakyat

Fabiola Febrinastri

Sabtu, 06 Agustus 2022 | 16:20 WIB

**Suara.com** - Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) kembali minta petani memanfaatkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pertanian dalam usaha tani mereka. Menurutnya, **KUR Pertanian memang didorong untuk mendukung sektor pertanian ke arah yang maju, mandiri dan modern.**

"KUR juga mendorong produktivitas pertanian. Petani juga terbantu permodalan dengan memanfaatkan fasilitas KUR Pertanian ini," kata Mentan SYL.

Program KUR sektor pertanian diminati petani. Hingga saat ini, serapan KUR Pertanian mencapai Rp66,303 triliun, jauh melebihi penyerapan pada tahun 2020 sebesar Rp55 triliun dan mendekati penyerapan KUR Pertanian pada tahun lalu sebesar Rp85 triliun.

Jumlah itu terserap untuk tanaman pangan sebesar Rp18,232 triliun, hortikultura Rp7,843 triliun, perkebunan Rp22,503 triliun, peternakan Rp11,552 triliun, kombinasi pertanian, perkebunan dan peternakan sebesar Rp5,307 triliun dan jasa pertanian, peternakan dan perkebunan sebesar Rp864 miliar.

Realisasi KUR Pertanian yang tinggi tersebut berdampak positif pada penguatan ketahanan pangan nasional. **Dengan memanfaatkan fasilitas KUR Pertanian, petani dapat terus mengembangkan budidaya pertanian mereka, sehingga produktivitas pun terdongkrak naik.**

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan, Ali Jamil menambahkan, KUR Pertanian dapat diakses untuk modal awal pengembangan budi daya pertanian dari hulu hingga hilir, seperti pembelian pupuk subsidi.

"Anggaran yang besar tersebut dapat digunakan masyarakat terutama yang



memiliki kemauan dan semangat tinggi untuk berkarya di dunia usaha tani," katanya.

Pemanfaatan KUR juga dapat dilakukan untuk mendukung berbagai kegiatan pertanian, mulai dari musim tanam, panen, pascapanen, hingga packaging atau pengemasan.

"KUR Pertanian membantu petani mengembangkan budi daya pertanian dari hulu hingga hilir. Jadi, ada banyak manfaat dari program KUR Pertanian ini dalam rangka mencapai tujuan pembangunan pertanian nasional," ujar Ali.

# KUR dan Pembiayaan Petani

Oleh: Indah Megahwati  
Direktur Pembiayaan Kementerian Pertanian RI

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) menekankan pentingnya kolaborasi untuk mengatasi krisis pangan dunia dalam pertemuan Menteri Keuangan dan Menteri Pertanian Negara G20 di Washington DC, AS, 11 Oktober 2022. Menurut SYL, kredit usaha rakyat (KUR) ibarat oasis di tengah semakin minimnya anggaran pemerintah.

**K**UR menjadi permudan petani untuk bisa terus meningkatkan produktivitas tanaman. Kementerian Pertanian mengawal pembiayaan di luar anggaran belanja negara di tengah gejolak ekonomi yang terjadi.

Permasalahan yang dihadapi petani pada umumnya adalah lemah dalam hal permodalan sehingga menghambat petani meningkatkan pendapatannya dan sulit keluar dari lingkaran kemiskinan. Pemberdayaan dapat menjadi tugas pokok dan fungsi perbankan dalam menolong masyarakat melalui pengembangan usaha dan bantuan permodalan.

Pembiayaan usaha tani melalui skema kredit yang disalurkan lembaga perbankan sangat membantu bagi petani yang tidak mempunyai modal usaha untuk budi daya. Hal ini juga menguraikan salah satu kebiasaan dalam menyediakan modal usaha tani melalui lembaga nonbank, seperti bank emok, pinjol, dan tengkulak.

Kerugian yang dirasakan selama ini dengan melakukan petani tidak memiliki posisi tawar dalam memasarkan produk karena terbelenggu dengan utang rentenir. Oleh karena itu, program KUR dengan bunga rendah membuat petani sangat terbantu agar tidak lagi terjerat utang rentenir.

Penyaluran KUR di luar anggaran belanja negara tergolong ringan dengan bunga 6 persen, tetapi bisa disubsidi 3 persen. Skema KUR yang disediakan oleh lembaga penyalur terdiri atas KUR Super Mikro dengan maksimum kredit sebesar Rp 10 juta, KUR Mikro dengan kredit Rp 10 juta hingga Rp 100 juta, dan KUR Kecil dengan kredit Rp 100 juta hingga Rp 500 juta.

Pada 2020, KUR Super Mikro yang diakses 4.194



debitur. Sementara itu, KUR Mikro digunakan 121.913 debitur, dan KUR Kecil dimanfaatkan 1.858.422 debitur. Pada 2021, KUR Super Mikro diambil 5.797 debitur, KUR Mikro diminati 174.870 debitur, dan KUR Kecil sebesar dipakai 2.435.777 debitur.

## Alsintan

Kementerian Pertanian juga mendorong peningkatan alat dan mesin pertanian melalui KUR taksis alat mesin pertanian (alsintan). Alsintan diharapkan mampu mewujudkan kedaulatan pangan dan peningkatan kesejahteraan melalui peningkatan produktivitas, efisiensi biaya, nilai tambah, dan daya saing produk pertanian.

Apalagi ketersediaan dan level mekanisasi dalam negeri masih rendah dibanding dengan negara maju dan negara tetangga, seperti Malaysia dan Thailand. Hal itu bertambah dengan kelangkaan tenaga kerja dan enggan generasi muda untuk bekerja dalam sektor pertanian. Target peningkatan penyediaan taksis alsintan 2022 difokuskan pada provinsi dengan zona utama dan zona andalan.

Program pemerintah yang sudah berjalan masih membutuhkan akselerasi agar optimal mulai hulu hingga ke hilir. Hulu mencakup sarana produksi dan input pertanian, produksi, dan budi daya pertanian. Sementara itu, hilir meli-

puti pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil pertanian, serta penunjang yaitu teknologi dan alsintan.

Beberapa upaya, yakni menjaga ketersediaan pangan pascapanen. Caranya dengan meningkatkan mutu pengering atau revitalisasi penggilingan agar kadar air bagus terjaga 14-15 persen. Selanjutnya, melatih penyuluh pertanian di akar rumput supaya bisa memberikan pemahaman kepada petani terkait situasi pangan terkini. Dengan demikian, bisa menjaga kestabilan harga maupun produksi.

Tak kalah penting kebijakan yang tegas dalam hal lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagai modal dalam ketahanan pangan. Selain itu, memetakan lahan-lahan spesifik di Kalimantan dan Jawa agar sesuai dengan peruntukannya. Ke depan, mesti dikembangkan pula sistem pembiayaan khusus petani. Hal itu bertolak dari tingginya realisasi KUR sektor pertanian.

Meskipun mudah mengakses modal, sistem pembiayaan harus tetap melihat lahan dan performa petani supaya tepat sasaran. Dengan demikian, pembiayaan yang mudah dan terjangkau bisa meningkatkan gairah petani, menarik minat kawula muda untuk bertani, dan bermuara pada ketahanan pangan.

Selain itu, strategi Kementerian Pertanian dalam menghadapi ancaman krisis pangan global, yakni meningkatkan ketersediaan pangan, sertifikasi pangan, lumpung pangan, pertanian modern (*smart farming*) pertanian spesifik, dan peningkatan ekspor. Poin tersebut dalam hal ini secara terkait dengan pembiayaan atau anggaran agar tidak selalu bertumpu pada biaya negara.

Penguatan sektor pertanian dan pangan menjadi salah satu prioritas utama pemerintah saat ini dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional, terlebih lagi saat ini dunia (termasuk Indonesia) sedang bersiap menghadapi ancaman krisis pangan yang dipicu oleh perubahan iklim, pandemi Covid-19 yang tidak kunjung berakhir, dan dinamika geopolitik global. Salah satu strategi utama yang dipersiapkan oleh pemerintah melalui Kementan adalah peningkatan kapasitas produksi komoditas pertanian strategis; yang mencakup pangan pokok, komoditas pemicu inflasi, komoditas substitusi impor, dan promosi ekspor. Agar strategi tersebut dapat berjalan optimal, maka diperlukan dukungan pembiayaan untuk usaha dari hulu ke hilir dan KUR merupakan sumber pembiayaan yang sangat potensial. KUR dapat menjadi titik ungkit penting dalam peningkatan kapasitas produksi melalui dampaknya terhadap peningkatan produktivitas (penggunaan input lebih optimal), indeks pertanaman (penggunaan alsintan), dan luas panen (penambahan penguasaan lahan, utamanya melalui sewa). Untuk itu, sangatlah tepat jika Mentan SYL begitu gencar dan bersemangat untuk mengoptimalkan pemanfaatan KUR sektor pertanian dalam kondisi pembiayaan yang bersumber dari APBN untuk pembangunan pertanian semakin terbatas.

Sejak diluncurkan tahun 2007, KUR juga telah terbukti sebagai salah satu instrumen yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan bagi para debiturnya. Hal ini ditunjukkan oleh fakta bahwa selama kurun waktu 2015-2022 ada sekitar 14,13 juta debitur yang telah berhasil “naik kelas” ke tingkat pembiayaan yang lebih tinggi (Siaran Pers Kemenko Perekonomian, 22 Juli 2022). Hal inilah yang juga diharapkan oleh SYL bahwa KUR sektor pertanian harus dapat menjadi salah satu sarana untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan petani. Untuk itu, Kementan yang dikomandoi oleh SYL melakukan langkah strategis untuk mendorong penyerapan KUR sektor pertanian, yaitu: (a) mempersiapkan usaha tani yang melakukan usaha produktif yang bersifat individu, kelompok, kemitraan dan/atau kluster untuk dapat dibiayai dengan kredit/pembiayaan; (b) menetapkan kebijakan dan prioritas bidang usaha yang akan menerima penjaminan kredit/pembiayaan, (c) melakukan pembinaan dan pendampingan selama masa kredit atau pembiayaan; dan

(d) memfasilitasi hubungan antara usaha tani dan perusahaan swasta dan koperasi dengan pihak lainnya untuk menjadi off taker/avalis yang memberikan kontribusi dan dukungan untuk mendapatkan KUR, serta kelancaran usaha.



Kerja keras dan serius Kementan untuk memastikan KUR sektor pertanian dapat diakses oleh petani dan pelaku usaha pertanian, membuahkan hasil yang dibuktikan dari terlampauinya target KUR sektor pertanian selama 2020-2022. Atas capaian tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM memberikan penghargaan kepada Kementerian Pertanian yang diterima langsung oleh Mentan SYL atas “*Capaian Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Sektor Pertanian dan Sektor Produksi Terbesar Tahun 2021*”. Menko Perkonomian dalam sambutannya menyatakan bahwa fasilitas KUR mampu memberi dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Layanan KUR sektor pertanian dinilai mampu membuat banyak petani kembali menghidupkan usaha taninya.

Keberhasilan pemanfaatan KUR untuk mendukung pembangunan pertanian tentu harus dipertahankan keberlanjutannya. Harapan SYL agar KUR dapat digunakan sebagai salah satu sarana untuk menjadikan petani Indonesia “naik kelas” kesejahteraannya dan mandiri, perlu dipertimbangkan arah pengembangan skema KUR ke depannya. Untuk memperluas jangkauan pelayanan KUR agar dapat diakses oleh petani kecil yang lebih banyak, namun tidak menambah

beban fiskal pemerintah yang lebih berat; maka perlu dipertimbangkan untuk membatasi pinjaman berulang KUR, utamanya bagi petani yang telah berhasil “naik kelas”. Bagi petani yang telah berhasil “naik kelas” secara bertahap diarahkan untuk mengakses kredit komersial, sehingga tujuan untuk mewujudkan kemandirian juga dapat tercapai.

## VII. Profil Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo



Syahrul Yasin Limpo yang lebih dikenal SYL lahir di Makassar, 16 Maret 1955, merupakan anak kedua dari pasangan Muh. Yasin Limpo dengan Nurhayati Yasin Limpo.

Riwayat Pendidikan yang dilaluinya cukup luar biasa. SYL menempuh pendidikan di Makassar sejak SD hingga berhasil meraih gelar profesor

kehormatan. Pada tahun 1967, tamat di SD Negeri Mangkura Makassar, 1970 menyelesaikan pendidikannya di SMP Negeri 6 Makassar. Kemudian pada tahun 1973, tamat SMA Katolik Cenderawasih Ujung Pandang.

Tapak karirnya di pemerintahan dimulai saat dia terangkat PNS pada tahun 1980 dan menjabat Kepala Seksi Tata Kota Tahun 1982. Selanjutnya sebagai Kepala Sub Bagian Perangkat IV & V PD. Biro Pemerintahan Umum Tahun 1983. Di tahun yang sama SYL meraih gelar sarjana di Fakultas Hukum Unhas.

Pasca meraih gelar sarjana, jiwa kepemimpinan SYL terus mencuat yang kemudian membuat dia menjadi Kepala Wilayah Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa Tahun 1984, Kepala Bagian Pemerintahan Setwilda Tk. I Sulsel Tahun 1987, Kepala Bagian Pembangunan Setwilda Tk. I Sulsel Tahun 1988 dan Kepala Bagian Urusan Generasi Muda & OR Setwilda Tk. I Sulsel Tahun 1989. Dia juga menjabat Sekretaris Wilayah Daerah Tk. II Kabupaten Gowa Tahun 1991 dan Kepala Biro Humas Setwilda Tk. I Tahun 1993.

Dia kemudian melanjutkan pendidikannya dengan mengambil gelar magister di Pascasarjana Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang diselesaikannya pada tahun 1999. Selain di LAN, dia juga mengambil S2-nya di Universitas Hasanuddin (Unhas), Fakultas Hukum (FH) dan selesai tahun 2004. Kemudian meraih gelar doktornya di FH Unhas pada tahun 2008. Hingga pada akhirnya, SYL dikukuhkan sebagai guru besar kehormatan Universitas Hasanuddin (Unhas) di Bidang Hukum

Tata Negara dan Pemerintahan pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas) pada 17 Maret 2022.

SYL juga aktif di organisasi kepemudaan sebelum terjun ke dunia politik seperti Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) sejak tahun 1990-1993 dengan jabatan Sekretaris DPP KNPI Sulsel. Kemudian tahun 1993-1998 sebagai Ketua DPP Angkatan Muda Pembangunan Indonesia (AMPI) Sulsel. Periode 1993-1998, dia menjadi Sekretaris DPP Golkar Sulsel dan Wakil Ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) pusat.

Tahun 2004-2008 menjabat sebagai Ketua Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (FKPPI) Sulsel sekaligus sebagai Ketua Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia (FORKI) Sulsel. Selanjutnya, Ketua Kwarda Gerakan Pramuka sejak tahun 2004. Ketua Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro) 57 tahun 1998. Dia juga sempat menjabat Ketua Organisasi Amatir Radio Indonesia (ORARI) Sulsel.

Pada tahun 2009-2018, SYL menjabat sebagai Ketua DPD I Golkar Sulsel. Kemudian akhirnya menjabat Ketua DPP Partai NasDem pada tahun 2018 hingga saat ini.

SYL terpilih sebagai Bupati Gowa dua periode sejak tahun 1994 sampai tahun 2002. Kemudian Wakil Gubernur Sulsel 2003-2008 mendampingi Amin Syam. Dia terpilih menjadi Gubernur Sulsel pertama yang dipilih secara langsung dalam pilkada 2007 bersama Agus Arifin, kemudian kembali terpilih di periode kedua hingga tahun 2018. Tahun pertama menjadi Gubernur, Syahrul menargetkan peningkatan posisi Sulawesi Selatan sebagai provinsi penyangga beras untuk kebutuhan nasional. Alhasil, Sulawesi Selatan diubahnya menjadi salah satu provinsi lumbung beras nasional. Atas prestasi tersebut, SYL pun dianugerahi Penghargaan Tanda Kehormatan Bintang Mahaputra Utama Bidang Pertanian oleh Presiden ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada tahun 2011. Hal itu juga yang telah membuat Presiden Joko Widodo memberikan amanah kepadanya agar menahkodai sektor pertanian nasional dalam Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024, tepat 23 Oktober 2019.

Sebagai Menteri Pertanian ke-28, SYL lantas tidak menyia-nyiakan kepercayaan yang telah diberikan Presiden Joko Widodo dan membuktikan diri mampu mewujudkan swasembada beras nasional di tengah tantangan yang tidak biasa melalui peningkatan produksi dalam negeri sehingga Indonesia tercatat tidak melakukan impor beras dari tahun 2019 hingga saat ini.

# SOLUSI SYL MEMENUHI KEBUTUHAN PEMBIAYAAN PERTANIAN MELALUI OPTIMALISASI KUR



Perhatian terhadap sektor pertanian tentu tidak terpisahkan oleh kuatnya perencanaan dan anggaran, walau dalam kenyataannya APBN tidak selalu mendukung seluruh program dan anggaran sektor pertanian. Selain itu, persoalan keterbatasan modal bagi para pelaku usaha pertanian, khususnya para petani, dan rendahnya akses ke sumber pembiayaan sering kali menjadi hambatan tersendiri dalam pembangunan sektor pertanian. Perlu gagasan dan tindakan cepat dan efektif dalam menghadapi setiap permasalahan dan keterbatasan, khususnya dalam pembiayaan pertanian, dan semua membutuhkan kerja keras dan harapan besar.

Sebagai salah satu sumber pembiayaan dalam mengatasi keterbatasan APBN dan masalah permodalan bagi pelaku usaha sektor pertanian, optimalisasi pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pertanian dimasa Menteri Pertanian SYL terbukti memberikan manfaat yang banyak kepada petani dan para pelaku pada sektor pertanian. Buku **“Solusi SYL Memenuhi Kebutuhan Pembiayaan Pertanian Melalui Optimalisasi KUR”** ini memberikan jalan keluar terhadap masalah keterbatasan anggaran pertanian dan permodalan bagi petani dalam mendorong petani “naik kelas” untuk mewujudkan pertanian maju, mandiri dan modern. Dalam buku ini menyajikan secara sistematis upaya dan terobosan SYL dalam mendorong pelaku usaha sektor pertanian khususnya petani untuk memanfaatkan KUR Pertanian dalam mengembangkan pertanian dari hulu hingga hilir serta mengajak para kepala daerah di Indonesia untuk memanfaatkan KUR pertanian secara masif dan berkelanjutan guna meningkatkan pangan nasional serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Bagian yang sangat penting dalam buku ini adalah bagaimana publik mengambil pembelajaran dari cara SYL untuk mengelola pembiayaan pertanian melalui optimalisasi KUR pertanian selama 3 tahun terakhir dimasa Pandemi Covid-19 untuk terus meningkatkan kinerja KUR Pertanian ke depan. Dengan adanya terobosan SYL tersebut, diharapkan dapat menginspirasi munculnya terobosan-terobosan baru lainnya bagi seluruh jajaran Kementerian Pertanian dari pusat hingga daerah, para kepala daerah, petani dan stakeholders yang bergerak pada sektor pertanian serta generasi penerus berikutnya dalam membangun pertanian yang maju, mandiri dan modern. Selamat membaca.

Penerbit :  
Kementerian Pertanian  
Jl. Ir. H. Juanda No.20, Kota Bogor 16122, Indonesia  
Telp (0251) 8321746, Fax (0251) 8326561

ISBN 978-979-582-220-2



9 789795 822202